

BAB III

SURAKARTA SEBELUM KEMERDEKAAN

Bab ini akan menguraikan keadaan Surakarta sebelum kemerdekaan yang mencakup sejak masa sebelum pendirian Keraton Surakarta sampai dengan masa awal Kemerdekaan. Agar memudahkan analisis maka pada bab ini akan dibagi menjadi dua hal pokok. Pertama, adalah dinamika politik yang mencakup tentang sejarah awal Keraton Mataram Islam, kerusuhan di Keraton Kartosura, membangun Keraton Surakarta, dan perpecahan Keraton. Kedua, akan menganalisis dinamika ekonomi yang mencakup masalah transformasi transportasi dari sungai ke kereta api, transformasi pertanian perkebunan ke industri gula, munculnya industri kecil, perkembangan perbankan dan depresi ekonomi, persaingan bisnis pada zaman pergerakan, dan masa pendudukan Jepang.

3.1. Dinamika Politik

3.1.1. Sejarah Keraton Mataram Islam

Pendiri Kerajaan Mataram Islam adalah Sutawijaya yang bergelar Panembahan Senopati Ing Alogo (1584-1601) dengan pusat kerajaannya adalah Kota Gede Yogyakarta. Pada masa Senopati ini telah dimulai penaklukan kerajaan-kerajaan yang lain seperti Pajang dan Demak. Pengganti Panembahan Senopati adalah Panembahan Seda ing Krpyak (1601-1613). Panembahan Krpyak meneruskan usaha penaklukan wilayah sampai ke Jawa Timur. Namun usaha ini belum berhasil, sampai beliau meninggal dunia yang digantikan oleh putranya Mas Rangsang yang bergelar Sultan Agung Hanyakrokusumo (1613-1646). Sultan Agung merupakan raja terbesar dalam sejarah Mataram Islam. Sultan Agung meneruskan penaklukan daerah sekitarnya yakni Madura (1624) dan Surabaya (1625). Sultan Agung juga berusaha untuk merebut Batavia dari tangan VOC yakni pada tahun 1628 dan 1629, namun semuanya berakhir dengan kegagalan (Ricklefs, 2005: 99-107).

Sepeninggal Sultan Agung pada tahun 1646, Keraton Mataram Islam dipimpin oleh Amangkurat I. Amangkurat I (1646-1677) memindahkan istana barunya di Plered, tepat di sebelah timur laut ibukota sebelumnya. Raja ini oleh para ahli sejarah dianggap sebagai raja yang buruk perangai. Semua kelompok yang tidak mendukungnya akan dibunuhnya. Tidak ada prestasi yang dapat diukir dalam regim pemerintahan Amangkurat I ini, yang menyebabkan kewibawaan Kerajaan Mataram Islam mulai merosot. Konspirasi untuk menggulingkan raja diprakarsai oleh putra mahkota sendiri yakni Amangkurat II yang memerintahkan Trunojoyo untuk memberontak. Pada akhirnya Amangkurat I kalah dan meninggal dunia di Tegal. Sejak itu, Amangkurat II (1677-1703) menjadi Raja Mataram. Atas bantuan VOC, pada akhirnya Amangkurat II berhasil mengalahkan Trunojoyo. Pada September 1680, Amangkurat II memindah ibu kota negara di sekitar daerah Pajang yang diberi nama Kartasura (Ricklefs, 2005: 179).

Pada tahun 1703, Amangkurat II mangkat dan digantikan oleh putranya Amangkurat III (1703-1708, w 1734). Namun tidak semua kerabat istana menyetujui pengangkatan Amangkurat III, salah satunya adalah pamannya sendiri Pangeran Puger. Konflik antara putra mahkota dengan pamannya sendiri ini memang sudah berlangsung lama sebelum Amangkurat II meninggal dunia. Ketika itu melicinkan jalan menjadi raja, Amangkurat II berkerjasama dengan Untung Surapati yang ketika itu menjadi musuh besar VOC. Maka, setelah Amangkurat III naik tahta, Pangeran Puger menghubungi VOC di Semarang dan menceritakan konspirasi Amangkurat III dengan Surapati. Diplomasi Pangeran Puger berhasil meyakinkan VOC dan pada Juni 1704, VOC mengakuinya Pangeran Puger sebagai Raja Mataram yang baru yang bergelar Susuhunan Pakubuwono I (1704-1719). Akhirnya pada bulan September 1705, Susuhunan Pakubuwono I berhasil mengalahkan Amangkurat III yang lari bersama dengan Surapati ke Jawa Timur (Ricklefs, 2005: 179).

Pakubuwono I mangkat digantikan oleh putranya yang bergelar Amangkurat IV (1719-1726). Pada masa ini muncul pemberontakan dari kalangan pangeran. Lagi-lagi VOC berhasil membantu dan mempertahankan raja. Pada bulan Maret 1726,

Amangkurat IV jatuh sakit dan mangkat yang kemudian digantikan putranya yang bergelar Pakubuwono II (1726-1749). Pada masa Pakubuwono II terjadi kerusuhan besar yang dikenal sebagai "Geger Pecinan" yang menjadi penyebab utama kepindahan Keraton Kartosura ke Keraton Surakarta.

3.1.2. Kerusuhan di Keraton Kartosura

Geger Pecinan di Kartosura tidak dapat dilepaskan oleh peristiwa pembantaian orang-orang Tionghoa oleh VOC di Batavia (Jakarta). Pembantaian itu disebabkan oleh akumulasi konflik antara orang-orang Eropa terhadap komunitas Tionghoa di Batavia. Konflik antara orang-orang Eropa dan orang-orang Tionghoa di Batavia adalah konflik khas perkotaan dimana para etnis yang hidup berdampingan saling bersaing dalam mencari penghidupan. Kehadiran sejumlah besar orang-orang Tionghoa dari China Daratan menyebabkan suasana Batavia menjadi semakin panas. Pada tahun 1740, jumlah Tionghoa diperkirakan telah mencapai sekitar 15.000 jiwa atau sekitar 17% total penduduk di Batavia. Kebanyakan Tionghoa pendatang itu tidak dapat memperoleh pekerjaan dan sebagian dari mereka menjadi sumber kerentanan sosial dengan semakin meningkatnya aksi-aksi kejahatan di sekitar Batavia (Ricklefs, 2005: 208).

Untuk membatasi semakin meningkatnya komunitas Tionghoa, VOC membuat larangan untuk mencegah banyaknya orang-orang Tionghoa datang ke Batavia. Sementara, bagi yang telah tinggal di Batavia dan tidak mempunyai pekerjaan tetap, VOC menangkap mereka dan membuangnya ke Ceylon (Srilangka) atau Kaap de Goede Hoop (Afrika). Yang dibiarkan tinggal di Batavia adalah orang-orang Tionghoa yang telah mempunyai izin tinggal. Untuk mendapatkan izin tinggal, orang-orang Tionghoa harus membayar kepada VOC. Bahkan ada beberapa pembesar VOC memeras orang-orang Tionghoa dengan meminta bayaran yang sangat mahal. Ini tentu saja meresahkan komunitas Tionghoa di Batavia. Apalagi ketika beredar isu bahwa orang-orang Tionghoa yang ditangkap dan dibawa ke Srilangka dan Afrika itu, sebenarnya di tengah jalan, mereka di lemparkan ke laut, menyebabkan keresahan

semakin menjadi-jadi. Situasi ini mendorong orang-orang Tionghoa bersiap melakukan melakukan penentangan kepada VOC (Liem, 2004: 35).¹

Pada 7 Oktober 1740, gerombolan-gerombolan orang Tionghoa yang berada di luar kota melakukan penyerangan dan pembunuhan beberapa orang Eropa. Agar orang-orang Tionghoa di dalam kota tidak bergabung dalam kerusuhan itu, VOC melakukan jam malam dan penggeledahan kepemilikan senjata di rumah-rumah orang Tionghoa. Ternyata penggeledahan atas rumah-rumah Tionghoa tidak terkendali lagi, tembakan membabi buta dilakukan oleh VOC. Pada 9 Oktober 1740 dimulailah pembunuhan besar-besaran terhadap orang-orang Tionghoa di Batavia. Diperkirakan orang-orang Tionghoa yang terbunuh sebanyak 10.000 orang. Perkampungan Tionghoa dirampok dan dibakar delapan (8) hari hari. Perampokan baru berhenti setelah VOC memberi premi kepada tentaranya untuk menghentikan penjarahan dan kembali kepada tugas rutinnnya. Sementara, orang-orang Tionghoa yang berhasil lolos dari pembantaian di Batavia melarikan diri ke timur, menyusuri sepanjang daerah pesisir bergabung dengan komunitasnya di Jawa Tengah untuk melakukan perlawanan terhadap VOC lebih lanjut (Ricklefs, 2005: 208).

Pembantaian komunitas Tionghoa di Batavia berdampak sangat besar bagi perkembangan politik, ekonomi dan sosial di Jawa. Pembantaian ini memunculkan solidaritas yang luar biasa untuk melawan VOC baik kalangan etnis Tionghoa maupun etnis Jawa seperti nanti diwakili oleh Pakubuwono II. Beberapa komunitas Tionghoa di pesisir juga langsung melakukan perlawanan kepada VOC. Pada Mei 1841, komunitas Tionghoa melakukan penyerangan pos VOC di Juwana. Markas besar VOC di Semarang dan beberapa pos lain di pesisir dikepung. Pada Mei 1741, VOC terpaksa meninggalkan posnya di Demak. Sementara pada Juni 1741, pos VOC di Rembang hendak dikosongkan, tetapi usaha itu gagal, pada bulan Juli personel VOC di sana di bantai (Ricklefs, 2005: 210).

¹ Buku Liem Thian Joe, "Riwayat Semarang" terbit pertama kali pada tahun 1931, yang kemudian diterbitkan lagi pada tahun 2004.

Sementara itu respons terhadap pembantaian orang-orang Tionghoa juga ditunjukkan oleh Pakubuwono II. Banyak yang menganggap bahwa Keraton Mataram ini memanfaatkan konflik VOC dengan Tionghoa, namun jelas bahwa dalam konteks keberanian melawan penjajah respons Pakubuwono II ini merupakan langkah positif. Dan ini mungkin juga salah satu bentuk solidaritas Raja Mataram terhadap kelompok Tionghoa. Sebenarnya di kalangan istana sendiri telah berkembang dua pendapat yang bersifat pro dan kontra terhadap rencana Pakubuwono II menyerang VOC bergabung dengan komunitas Tionghoa. Pandangan pertama seperti diutarakan kelompok Patih Natakusuma memilih melawan VOC sebagai sebuah langkah strategis dengan jalan bergabung dengan komunitas Tionghoa. Kelompok lain dipimpin oleh penguasa daerah pesisir yang berpendapat bahwa dalam peperangan VOC dan Tionghoa, pada akhirnya akan dimenangkan oleh VOC. Maka mereka menganjurkan tidak perlu tergesa-gesa, sebaiknya menunggu sampai VOC terdesak dan meminta bantuan Mataram. Dua pertimbangan ini menyebabkan Pakubuwono II sempat ragu-ragu, namun pada akhir Raja Mataram ini lebih memilih pandangan yang pertama yakni segera melakukan penyerangan kepada VOC. Pada November 1741, Pakubuwono II mengirim pasukan dan artileri ke Semarang sebanyak 20.000 orang dan 30 pucuk meriam yang bergabung 3.500 orang Tionghoa mengepung Markas Besar VOC di Semarang. Selain itu, Pakubuwono II juga menyerang pos VOC di Kartasura yang berhasil membunuh Kapten Johansen van Nelsen dan menghancurkan markas itu (Ricklefs, 2005: 211).

Dalam posisi sulit itu, akhirnya VOC mendatangkan bala tentaranya dari Batavia dan meminta bantuan Cakraningrat IV dari Madura. Mereka berhasil memukul mundur kepungan Tionghoa yang dibantu Mataram di Markas VOC Semarang. Bahkan Cakraningrat IV berhasil mengalahkan para pejuang Tionghoa di wilayah timur. Setelah kekalahannya itu, Pakubuwono II baru menyadari bahwa pilihannya untuk mendukung komunitas Tionghoa melawan VOC adalah sebuah tindakan yang keliru. Untuk itu Pakubuwono segera memohon ampun kepada VOC. VOC mengabulkan dan mengirim utusan yang dipimpin Kapten Van Hohendorff ke Kartasura untuk melakukan perundingan. Sementara, Pakubuwono II mengirim juru

runding yang dipimpin oleh Patih Natakusuma ke VOC Semarang, namun VOC menangkap Patih itu dan membuang ke luar negeri. Penangkapan dan pembuangan Patih Natakusuma atas seizin Pakubuwono II (Ricklefs, 2005: 212).

Perubahan sikap Pakubuwono II menimbulkan ketidakpuasan dari berbagai kalangan. Para pejuang anti VOC baik dari kalangan Jawa maupun Tionghoa merasa telah dikhianati oleh Raja. Situasi ini memunculkan perlawanan pejuang yang lebih hebat baik kepada VOC maupun Pakubuwono II. Bahkan beberapa pangeran istana yang tidak puas dengan Pakubuwono II pun bergabung dalam makar ini diantaranya Pangeran Mangkubuni (kelak menjadi Sultan Hamengkubuwono I) dan Raden Mas Said (kelak menjadi Pangeran Adipati Mangkunegara). Isu perlawanannya pun berubah dari anti VOC menjadi anti Pakubuwono, maka sasaran penyerangannya adalah Keraton Pakubuwono II di Kartasura. Pada tahun awal 1742, para pemberontak itu mengangkat salah seorang pangeran cucu laki-laki dari Amangkurat III yang baru berusia 12 tahun yang bernama Mas Gerendi yang bergelar Amangkurat V atau lebih dikenal dengan sebutan Sunan Kuning. Sunan Kuning adalah sebutan sunan yang diangkat oleh komunitas Tionghoa. Pemberontakan ini berhasil merebut Keraton Kartasura pada bulan Juli 1742, dan Pakubuwono II lari ke Panaraga (Liem, 2004: 37).

Kenaikan Mas Garendi sebagai Raja Pemberontak yang diangkat oleh Komunitas Tionghoa dan berhasil merebut Keraton Kartosuro telah mengguncangkan sendi-sendi kekuasaan Kerajaan Mataram Islam. Tidak saja dari sudut politik, tetapi juga dapat dipandang dari sudut budaya. Bahkan kenaikan Mas Garendi itu dihubungkan dengan keyakinan orang Jawa terhadap Ramalan Jayabaya. Ramalan Jayabaya pernah meramalkan bahwa nanti “orang asing” akan memimpin Jawa “seumur Jagung”. Bahkan seorang intelektual Indonesia yang cukup rasional pun seperti Tan Malaka percaya dengan itu (2000: 16):²

² Pendapat masyarakat tentang penguasaan Jawa oleh orang Tionghoa yang diwakili oleh Mas Garendi seperti dalam buku Tan Malaka “Aksi Massa” yang terbit pertama kali pada tahun 1920-an, mewakili suasana kebatinan masyarakat pada masa itu. Namun pada tahun 1940-an, terjadi perubahan tafsir “Ramalan Jayabaya” itu di kalangan masyarakat, karena

“... Jawa sesungguhnya dikungkung oleh ramalan Empu Sedah: orang asing akan memimpin.....semua perang saudara ini, besar atau kecil, untuk kepentingan bangsa asing, dalam waktu singkat berakhir dengan kemenangan Tionghoa-Jawa bernama Mas Garendi.”

Secara kebudayaan kemenangan politik Tionghoa di Kartosuro itu semakin menorehkan luka bagi orang Jawa. Raja dan Kerajaan merupakan simbol penting masyarakat Jawa pada masa itu yang berhasil dikalahkan oleh orang Tionghoa. Kemenangan Mas Garendi merupakan pengulangan sejarah di mana muncul Raja yang didukung oleh orang-orang Tionghoa. Sebelumnya pernah ada Raja dari keturunan Tionghoa-Jawa yang bernama Raden Patah yang berhasil mendirikan Kerajaan Demak dan mengalahkan Kerajaan Majapahit (Malaka, 2000: 15).

Dalam pelariannya, Pakubuwono II meminta bantuan kepada VOC dengan memberikan konsesi, jika bisa kembali menjadi Raja, maka akan memberikan wilayah pesisir Pulau Jawa kepada VOC. VOC menyetujui dan meminta bantuan kepada Cakraningrat IV untuk melawan para pemberontak. Bersama dengan lasykar Madura, Cakraningrat IV berhasil mengalahkan pemberontak. Dan atas permintaan VOC, Cakraningrat IV menyerahkan Keraton Kartosura kepada Pakubuwono II.³ Setelah Pakubuwono II kembali berkuasa segera merealisasi konsesi-konsesi kepada VOC diantaranya adalah (1) kedaulatan penuh atas Madura Barat, Surabaya, Rembang, Jepara; (2) Raja menyerahkan 5000 koyan (sekitar 8.600 metrik ton) beras setiap tahun untuk selama-lamanya; (3) Patih hanya dapat dipilih dengan persetujuan VOC; (4) ada sebuah garnisun VOC di istana; (5) orang Jawa tidak boleh berlayar ke mana pun di luar Jawa, Madura dan Bali (Ricklefs, 2005: 214).

yang dianggap menguasai Jawa "seumur jagung" adalah Jepang selama pendudukan dari tahun 1942-1945. Buku Tan Malaka "Aksi Massa" itu diterbitkan kembali pada tahun 2000.

³ Jasa orang-orang Madura dalam merebut kembali Keraton Kartosuro ini yang menjadi salah satu sebab berkembangnya etnis Madura di Surakarta. Bahkan nanti pada masa Pakubuwono III, orang-orang Madura banyak mengabdikan Keraton sebagai prajurit bergabung dengan Lasykar Keraton Lombok Abang. Sebagian besar dari etnis Madura ini bermukim di kampung Madura yang disebut sebagai Kampung Sampangan (Sutirto, 2000: 91-92).

Ketika kembali ke Kartasura, pada 21 Desember 1742 Pakubuwono II, mendapati istana dalam keadaan rusak parah. Yasadipura –Pujangga Istana- dalam Babad Giyanti menceritakan suasana memilukan ketika Raja kembali ke istananya yang telah rusak “ Raja tampak kelihatan seperti biasanya ketika istana masih kaya raya dan jaya. Tetapi dalam hati sangat bersedih memikirkan keadaan istana beserta segala isinya porak poranda, laksana hilang dibakar oleh musuh yaitu Cina...” Maka, Raja meminta kepada Patih Pringgalaya dan Sindureja serta Van Hohendorf (VOC) segera mencari tempat untuk membangun keraton baru (Sudharmono, 2006: 17).

3.1.3. Membangun Keraton Surakarta

Keinginan untuk membangun keraton baru, setelah Karaton Kartosuro rusak parah, bagi Pakubuwono II bukan perkara mudah. Terutama sejak beliau sempat tersingkir dari Keraton Kartosura dan atas bantuan VOC bertahta kembali di Keraton Katosura. Yang jelas mulai saat itu setiap tindakan dan langkah Raja harus mendapatkan izin dari VOC. Beberapa alternatif tempat yang baru telah disampaikan Raja kepada VOC salah satunya adalah kawasan Tingkir Salatiga. Van Hohendorff melaporkan kepada Kantor Pusat VOC di Batavia tentang keinginan Raja untuk memindahkan Ibu Kotanya pada tahun 1742. Setahun kemudian ada surat dari Gubernur Jenderal Johannes Thedens yang isinya: “Raja berkehendak memindahkan istana: wilayah Tingkir di daerah Salatiga yang direncanakan Raja, sepertinya sangat sesuai dengan yang diharapkan” (De Jonge: IX:426 dalam Sudharmono, 2006: 17). Namun wacana untuk pindah ke wilayah utara Kartosura tidak terwujud, kendati pun mungkin di daerah itu juga terdapat sungai besar yang mengalir dari selatan ke utara yakni Sungai Tuntang yang mengalir dari Salatiga ke Demak.

Namun rupanya Pakubuwono II masih ragu-ragu dengan alternatif tempat di kawasan Tingkir Salatiga itu. Justru beliau pada akhirnya meminta Patih Pringgalaya dan Sindureja serta Van Hohendorf mencari tempat ke daerah selatan. Akhirnya Ketiga orang itu mencoba mencari alternatif daerah ke wilayah selatan. Ada tiga tempat yang menjadi alternatif keraton yang baru yakni Desa Kadipolo, Sonosewu dan Sala. Menurut Tumenggung Honggowongsi jika karaton dibangun di Desa

Kadipolo dikemudian hari akan makmur, namun keraton akan cepat rusak dan banyak perang saudara. Bahkan Tumenggung Honggowongso meramalkan, jika keraton berdiri di Kadipolo hanya akan berusia maksimal 100 tahun. Sebaliknya jika keraton didirikan di Desa Sonosewu yang berada di sebelah timur Bengawan Sala, menurut Honggowongso tempat ini kurang cocok dan diramalkan hanya akan berusia 120 tahun, banyak perang dan akan kembali ke Agama Hindu Budha. Sementara, kalau keraton didirikan di Desa Sala, menurut Honggowongso akan menjadi keraton besar dan dapat berumur lebih dari 200 tahun (Winarti, 2004:20).

Namun di luar aspek-aspek spiritual itu, pemilihan Desa Sala juga mengandung aspek strategis geografis. Tampaknya dari pihak VOC mempunyai visi yang cukup jelas tentang sebuah ibu kota negara yang baru yakni harus dekat dengan sungai besar sebagai sarana transportasi. Seperti telah disebutkan di atas, usulan pertama untuk ibu kota baru adalah daerah Tingkir (Salatiga) yang dekat dengan Sungai Tuntang yang mengalir dari Salatiga ke Demak. Pilihan kedua adalah Bengawan Sala yang berhulu di Pegunungan Seribu (Wonogiri) mengalir dari selatan ke utara sampai ke Bojonegoro dan Surabaya. Maka, dibandingkan Sungai Tuntang, Bengawan Sala lebih menjangkau wilayah yang lebih luas ke arah timur. Apalagi Bengawan Sala ketika itu, sudah merupakan bandar yang relatif cukup besar yang telah menjadi persinggahan pedagang dari Gresik dan Surabaya sejak zaman Pajang. Selain itu, di sekitar Bengawan Sala sudah terdapat permukiman multi etnis seperti Arab, Tionghoa, Madura dan juga kantor-kantor perdagangan VOC (Sudharmono, 2006: 10).

Pembangunan Keraton Surakarta memakan waktu sekitar 3 tahun yang selesai pada akhir tahun 1745. Penanggungjawab utama pembangunan adalah Van Hohondorff yang tentu saja menggunakan tenaga-tenaga arsitek dari Belanda. Sementara para pekerja terdiri atas Wadana, Kaliwon, Panewu, Mantri, Lurah, Bekel dan Jajar. Perpindahan resmi Raja dari Kartosura ke Surakarta terjadi pada 17 Februari 1746 yang merupakan dianggap berdirinya Kota Surakarta Hadiningrat (Winarti, 2004:24).

3.1.4. Perpecahan Keraton

Perpindahan Keraton dari Kartosura ke Surakarta ternyata tidak menyurutkan konflik politik di Kerajaan Mataram Islam itu. Beberapa pemberontak yang melawan Pakubuwono II masih berjalan seperti antara lain Raden Mas Said yang bermarkas di Sokawati (Sragen). Untuk meredam pemberontakan itu, Raja mengumumkan bahwa siapa pun yang dapat mengusir mereka dari Sokawati akan diberi hadiah bertupa tanah sejumlah 3.000 cacah. Pangeran Mangkubumi bersemangat menerima tawaran itu. Pada tahun 1746 dia berhasil mengusir Raden Mas Said dari Sukawati dan menuntut hadiah yang ditawarkan oleh Raja. Akan tetapi, musuh lamanya di istana, Patih Pringgalaya (1742-55) membujuk Raja untuk menahan hadiah itu. Di tengah situasi yang genting itu, datanglah Gubernur Jenderal VOC dari Batavia Van Imhoff yang semakin memperkeruh suasana (Moedjanto, 1994:12).

Kedatangan Van Imhoff sebenarnya adalah mengurus kepentingan VOC tentang hak atas pesisir Pulau Jawa sebagai bagian dari perjanjian dengan Pakubuwono II pada tahun 1743. VOC mempunyai hak atas daerah yang sempit di sepanjang wilayah pesisir dan semua sungai yang mengalir ke laut. Namun yang diinginkan oleh VOC lebih dari itu. VOC berkeinginan menguasai seluruh pelabuhan di wilayah pesisir. Akhirnya Pakubuwono II terpaksa mengabdikan keinginan VOC dengan uang sewa sebesar 20.000 real per tahun. Padahal biasanya para pejabat sjahbandar akan setor ke Kerajaan sebesar 94.176 real pertahun. Jadi jumlah yang disepakatai oleh VOC itu sangat sedikit dan merugikan Kerajaan. Ketika Pakubuwono II memberitahukan hal ini kepada para penasehat dan pangeran, sebagian besar dari mereka tidak setuju termasuk Pangeran Mangkubumi. Mangkubumi beranggapan bahwa Raja terlalu lemah di bawah tekanan VOC. Ketidaksetujuan Mangkubumi itu menyebabkan ketidaksukaan Van Imhoff kepadanya. Maka, dalam kasus pemberian wilayah Sukowati kepada Mangkubumi, Van Imhoff sependapat dengan Patih Pringgalaya mendesak hal itu jangan diserahkan. Dalam suatu *paseban* di istana, Van Imhoff mengkritik secara langsung Mangkubumi yang menganggapnya terlalu ambisius dan tidak tahu berterima kasih kepada Raja. Kecaman Van Imhoff di muka umum itu

sangat menyinggung Pangeran Mangkubumi yang memicu lahirnya pemberontakan besar di Keraton Surakarta pada Mei 1746 (Ricklefs, 2005: 218-219).

Setelah peristiwa paseban itu, pada malam harinya Pangeran Mangkubumi beserta pengikutnya meninggalkan Surakarta menuju Sukawati bergabung dengan pasukan Raden Mas Said melancarkan pemberontakan. Alasannya karena Raja ingkar janji dan Belanda yang dianggap *murang* tata atau kurang ajar. Kolaborasi Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said dalam waktu yang singkat mendapatkan pengikut yang banyak. Pada tahun 1747, Mangkubumi memimpin pasukan yang diperkirakan 13.000 prajurit, termasuk diantaranya 2.500 prajurit kavaleri. Pada tahun 1748, Mangkubumi dan Raden Mas Said menyerang Surakarta, kendati pun tidak berhasil merebut kota itu. Pada saat ini pasukan VOC dan Kerajaan dalam keadaan lemah, sehingga tidak dapat mengalahkan pemberontak dan hanya dapat bertahan di Ibu Kota Negara (Ricklefs, 2005: 219).

Di tengah pemberontakan itu, pada penghujung 1749, Pakubuwono II jatuh sakit. Gubernur Jenderal VOC yang baru yakni Von Hohendorff (1748-54), utusan VOC yang membantu Pakubuwono II merebut kekuasaannya kembali di Kartsura, berangkat ke Surakarta untuk mengawasi berlangsungnya pergantian kekuasaan. Bertemu dengan kawan lama, Pakubuwono II mengusulkan agar Von Hohendorff sendirilah yang mengambil alih kepemimpinan atas negara. Maka, dibuatlah perjanjian dengan VOC yang ditandatangani pada tanggal 11 Desember 1749 yang menyerahkan kedaulatan atas seluruh kerajaan kepada VOC. Raja wafat sembilan hari kemudian. Pada 15 Desember 1749, Van Hohendorff mengumumkan pengangkatan putra mahkota sebagai Susuhunan Pakubuwono III (1749-88). Pada waktu bersamaan, Pangeran Mangkubumi di markasnya Yogyakarta juga dinobatkan oleh pengikutnya sebagai Susuhunan Pakubuwono tandingan. Sementara, Raden Mas Said sebagai menjabat sebagai Patih Mangkubuminya. Dengan demikian sejak akhir 1749 itu, Jawa terbagi menjadi dua, antara seorang raja pemberontak dan seorang raja yang didukung oleh VOC. Perbedaannya sekarang ialah pemberontak sangat kuat,

sedangkan raja dukungan VOC jauh lebih lemah, sehingga pemberontakan sulit dihancurkan (Ricklefs, 2005: 220).

Pada tahun 1752, terjadi perpecahan antara Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. Konflik dua pangeran pemberontak itu di satu sisi memperberat VOC namun di sisi lain merupakan peluang VOC untuk menyelesaikan perang berkepanjangan itu. Pada tahun 1754, Gubernur Jenderal Nicolaas Hartingh (1754-61) menawarkan perundingan kepada Pangeran Mangkubumi. Mangkubumi dijanjikan akan mendapat separoh dari Kerajaan Mataram; mendapatkan separoh dari pembayaran uang sewa 20.000 real tiap tahun; dan VOC bersedia membantu melawan Raden Mas Said. Pakubuwono III tidak dimintai pendapat tentang pembagian kerajaan ini, tetapi dia juga tidak punya pilihan lain kecuali menyetujuinya. Pada tanggal 13 Februari 1755, Perjanjian Ganti ditandatangani dan VOC mengakui Mangkubumi sebagai Sultan Hamengkubuwono I dengan pusat pemerintahannya di Yogyakarta. Peristiwa ini disebut sebagai Palihan Nagari. (Ricklefs, 2005: 221).

Pada perjanjian Ganti itu ditetapkan bahwa baik Sunan Pakubuwono III dan Sultan Hamengkubuwono I mendapatkan wilayah negara agung di sekitar wilayah Keraton masing-masing sebesar 53.100 karya (bahu atau cacah). Namun untuk daerah-daerah mancanegara atau daerah kekuasaan di luar negara agung, Sultan Hamengkubuwono I mendapatkan daerah sedikit lebih luas dari pada yang diterima Sunan Pakubuwono III. Kemungkinan karena daerah yang diterima Sultan kurang subur dibandingkan yang diterima Kasunanan. Daerah-daerah mancanegara yang masuk Kasunanan Surakarta adalah Jagaraga, Panagara, separoh Pacitan, Kediri, Blitar, Ladaya, Srengat, Pace (Nganjuk-Berbek), Wirasaba (Mojoagung) Blora, Banyumas dan Kaduwang. Sementara daerah mancanegara yang masuk Kasultanan Yogyakarta adalah Madiun, Magetan, Caruban, separoh Pacitan, Kertasana, Kalangbret, Ngrawa (Tulungagung), Japan (Mojokerto), Jipang (Bojonegoro), Teras Karas (Ngawen), Kedu, Sela Warung (Kuwu Wirasari) dan Grobogan. Pembagian daerah ini disesuaikan dengan kepentingan VOC dan untuk melemahkan Kasunanan

maupun Kasultanan. Dengan wilayah yang terpencar-pencar itu, kedua kerajaan itu tidak dapat mengorganisasikan kekuasaannya secara optimal dan akan selalu terjadi konflik perbatasan diantara dua kerajaan itu (Moedjanto, 1994:13).

Dengan berdirinya Kasultanan Yogyakarta, VOC tinggal menghadapi perlawanan Raden Mas Said masih mempunyai pasukan cukup kuat. Pada Oktober 1755, Mas Said berhasil mengalahkan satu pasukan VOC, bahkan pada Februari 1756 hampir berhasil membakar istana baru di Yogyakarta. Namun perlawanan Raden Mas Said menjadi semakin berat karena dia melawan tiga kekuatan sekaligus yakni Surakarta, Yogyakarta dan VOC. Akhirnya pada bulan Februari 1757, Raden Mas Said menyerah kepada Pakubuwono III, dan pada bulan Maret pada perjanjian Salatiga, ia resmi mengucapkan sumpah setia kepada Surakarta, Yogyakarta dan VOC. Imbalannya, dia mendapatkan tanah berikut 4000 cacah dari Pakubuwono III dan bergelar menjadi Pangeran Adipati Mangkunegara I (1757-1795), namun tidak mendapatkan apa-apa dari Hamengkubuwono I. Berakhirnya perlawanan Raden Mas Said, telah membawa kedamaian di Jawa untuk sementara waktu pada kurun waktu 1757-1825 atau sebelum terjadinya Perang Jawa terbesar yang diprakarsai oleh Pangeran Diponegara (Ricklefs, 2005: 223).

Selama masa yang damai itu, masyarakat Jawa mengalami pertumbuhan yang pesat. Jika pada tahun 1755 penduduk di Surakarta dan Yogyakarta hanya sekitar 690.000 jiwa, maka pada 1795 meningkat menjadi 1,4 sampai 1,6 juta jiwa. Sementara jumlah penduduk di daerah pesisir Jawa dan Madura tidak lebih dari sekitar 380.000 sampai 490.000 jiwa pada tahun 1755, dan pada tahun 1795 mengalami peningkatan hingga mencapai 1,5 juta jiwa. Pada era ini, VOC mengalami kemunduran dan akan gulung tikar yang disebabkan oleh dua hal pokok. Pertama, secara internal VOC telah terjadi penyalahgunaan dan korupsi besar-besaran. Kedua, Belanda kalah perang dengan Perancis, sehingga Kerajaan Belanda diambil alih oleh Napoleon Bonaparte dan membentuk negara boneka di sana sejak 1795. Maka secara resmi pada 1 Januari 1800, VOC dibubarkan dan Pemerintah Belanda mengambilalih kekuasaan di Hindia (Ricklefs, 2005: 223).

Pemerintah Belanda benar-benar memanfaatkan situasi persaingan antar tiga kekuatan kerajaan di Jawa Tengah yakni Keraton Kasunanan, Keraton Kasultanan dan Kadipaten Mangkunegaran. Sementara ketiga kerajaan itu juga mengambil posisi yang berbeda-beda terhadap Pemerintah Belanda. Ketiga keraton itu mempunyai sikap politik yang berbeda-beda tergantung kepiawaian Raja yang memimpin pada masa itu. Secara umum sikap Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta dengan Pemerintah Belanda mengalami pasang naik dan surut. Ada beberapa era dimana Raja bersifat akomodatif terhadap Belanda, namun ada beberapa yang lain sangat konfrontatif. Di jajaran Raja Kasunanan Surakarta terdapat Pakubuwono IV (1788-1820) pada mulanya bersifat akomodatif terhadap Pemerintah Belanda, namun pada akhirnya berkomplot dengan Pasukan Sepoy (1814-1815) mencoba melawan Pemerintah Belanda. Namun Gubernur Jenderal Rafles tidak menurunkan Pakubuwono IV, tetapi hanya membuang seorang pangeran yang terlibat dalam gerakan perlawanan itu (Ricklefs, 2005: 223). Sementara itu, Pakubuwono VI (1823-1830) secara tidak langsung mendukung perlawanan Pangeran Diponegoro, maka beliau dibuang ke Ambon sampai wafatnya pada 1849 (Ricklefs, 2005: 257).

Dampak dari Perang Diponegoro dan rencana perlawanan Pakubuwono VI ini adalah pengurangan wilayah kekuasaan Kasunanan Surakarta hingga hanya sebesar Eks Karesidenan Surakarta, dan Kasultanan Yogyakarta menjadi sebesar wilayah DIY sekarang ini (Moejanto, 1994:32). Daerah dua kerajaan itu Kasunanan dan Kasultanan sejak tahun 1799 disebut sebagai *Vorstenlanden*, sementara di luar wilayah itu disebut daerah *Gubermen* (Suhartono, 1991b: 20).

Demikian pula yang terjadi pada Kasultanan Yogyakarta yakni pasang naik dan surutnya hubungan dengan Pemerintah Belanda tergantung dengan karakter Sultan yang berkuasa pada masanya. Pada masa Hamengkubuwono II (1792-1826) hubungan Kasultanan Yogyakarta terhadap Pemerintah Belanda memburuk. Beberapa kali Hamengkubuwono II melakukan perlawanan kepada Pemerintah. Puncak perlawanannya terjadi pada Juni 1812, ketika Inggris didukung oleh 1200 prajurit berkebangsaan Eropa dan Sepoy India yang didukung oleh 800 prajurit

Legiun Mangkunegaran berhasil merebut istana Yogyakarta. Kemudian Istana Yogyakarta dirampok, perpustakaan dan arsipnya dirampas, sejumlah uang diambil dan Hamengkubuwono II dimakzulkan dan dibuang ke Penang. Penggantinya Hamengkubuwono III sangat akomodatif terhadap kepentingan Pemerintah Belanda. Pada era inilah muncul perlawanan terbesar dalam sejarah perang di Jawa yaitu Perang Diponegara (1825-30). Patih Natakusuma yang juga saudara kandung sultan, karena membantu tentara Inggris melawan Hamengkubuwono II mendapatkan hadiah daerah merdeka dengan 4.000 cacah dan dianugerahi gelar Pakualaman I (1813-1829). Berdirinya Pakualaman menegaskan bahwa pemerintah kolonial telah berhasil merekayasa pembagian Kerajaan Mataram Islam menjadi dua kerajaan senior yakni Kasunanan dan Kasultanan, dan dua kerajaan junior Mangkunegaran dan Pakualaman (Ricklefs, 2005: 250).

Kadipaten Mangkunegaran adalah kekuatan ketiga yang paling akomodatif terhadap kekuasaan Belanda. Sikap ini diambil karena pada mulanya posisi Mangkunegaran yang paling lemah dibandingkan Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta di mata Belanda. Ketika Raden Mas Said diangkat menjadi Mangkunegaran I terdapat ketidakpastian apakah keturunannya akan dapat meneruskan kekuasaannya. Selain itu, secara politik kekuasaan Mangkunegaran hanya hanya sebagai Adipati jauh lebih lemah dibandingkan dengan Kasunanan. Di sinilah sikap akomodatif Mangkunegaran dapat dipahami. Bahkan pada tahun 1808 atas perintah Gubernur Jenderal Daendels, Mangkunegaran II membentuk "Legiun Mangkunegara" yakni 1150 orang prajurit yang terdiri atas pasukan infanteri, kavaleri dan artileri dibiayai oleh Pemerintah Belanda. Mangkunegaran II mendapatkan pangkat Kolonel dan diberi 10.000 ryksdaalders lebih setiap tahun sebagai gaji. Legiun ini nantinya akan banyak melaksanakan tugas membantu Belanda diantaranya dalam penyerangan Yogyakarta (1812), Perang Diponegoro (1825-30) dan Perang Aceh (1873-4) (Ricklefs, 2005: 244).

Keterlibatan Mangkunegaran membantu Pemerintah Belanda dalam perang-perang itu, menyebabkan posisi tawar politik Mangkunegaran menjadi semakin

tinggi. Ini mengakibatkan Mangkunegaran merasa tidak lebih rendah daripada Kasunanan, kecuali dalam hal gelar. Ini yang membedakan dengan Pakualaman yang tetap dibawah kendali Kasultanan Yogyakarta. Karena luas wilayah kekuasaan Pakualaman sangatlah sempit dibandingkan dengan Kasultanan Yogyakarta yakni terdiri atas satu kecamatan dalam kota Yogyakarta dan empat kecamatan di Wilayah Kulon Progo (Moedjanto, 1994: 32). Sementara itu Pakualaman juga tidak mempunyai pasukan prajurti yang kuat. Memang pada mulanya Belanda akan mendesaian Pakualaman sama dengan Mangkunegaraan dengan membentuk pasukan prajurit yang bernama Korps Pakualaman yang terdiri atas 100 prajurit kavaleri yang berkembangn menjadi 50 prajurit kavaleri dan 100 prajuriti infanteri. Namun tidak seperti Legiun Mangkunegaran, Korps Pakualaman ini tidak pernah mempunyai arti penting dan akhirnya dibubarkan pada tahun 1892. Sehingga praktis Pakualaman tetap di bawah bayang-bayang kekuasaan Kasultanan (Ricklefs, 2005: 250).

Apalagi ketika Mangkunegaran justru mengembangkan aspek bisnisnya yang dapat memperkuat sumber keuangannya, praktis dari sudut ini Pakualaman jauh lebih maju dari pada Kasunanan. Karena Kasunanan Surakarata tidak pernah terjun dalam bidang bisnis.⁴ Mangkunegaran mengembangkan bisnis dalam bidang perkebunan dengan bantuan Belanda, terutama untuk komoditi kopi dan gula. Pada masa Mangkunegoro IV (1853-81) memperkerjakan orang-orang Eropa untuk memperkenalkan teknik-teknik Eropa dalam mengelola dan mengeksploitasi kekayaan negara, dengan tujuan bahwa keuntungan yang dihasilkan akan ditanamkan kembali. Pada tahun 1857 dan 1877, Mangkunegara IV gagal mendapatkan kembali perkebunan-perkebunannya yang telah disewakan kepada pengusaha Eropa. Namun dia mempunyai pemikiran cerdas, dengan mengganti sistem apanage atau tanah lunggu bagi para abdi dalem dan pejabatnya dengan sistem gaji. Tanah-tanah itu

⁴ Lihat diskusi dengan BRM Bambang Irawan, Humas Keraton Kasunanan, pada 25 Juli 2007 yang menyatakan bahwa Karaton Kesunanan tidak mengelola bisnis apapun selama berkuasa hingga kini. Sementara Mangkunegaran sejak awal berdiri telah mempunyai visi bisnis dengan mengembangkan perkebunan komoditi ekspor dan mempunyai pabrik gula Tasik Madu dan Colo Madu. Yang dilakukan Keraton Kasunanan dalam bidang bisnis adalah hanyalah menyediakan fasilitas umum seperti pasar dan tidak mempunyai badan usaha satu pun.

tersebut kemudian dikelola Mangkunegaran menjadi perkebunan yang menanam komoditi ekspor yang menghasilkan keuntungan yang besar. Tidak hanya itu, seiring dengan perkembangan teknologi pabrik gula di dunia, Mangkunegaran juga mempunyai dua pabrik gula yakni Tasik Madu dan Colo Madu (Suhartono, 1991:20) (lihat Boks 1).

**BOKS 1:
BISNIS KADIPATEN MANGKUNEGARAN**

Perkebunan Kopi

Pada tahun 1814, Mangkunegaran telah mulai menanam kopi. Namun dengan adanya Perang Diponegoro (1825-1830), pendapatan kopi Mangkunegaran menurun. Namun pada masa Mangkunegoro IV, bisnis kopi mengalami perkembangan yang pesat. Kalau sebelum tahun 1864 hasil kopi Mangkunegaran hanya 2.787 kwintal, tujuh tahun kemudian hasil kopi telah mencapai 10.957 kwintal. Pada tahun 1881 atau akhir Mangkunegoro IV, produksi kopi telah mencapai 20 kali lipat atau sekitar 40.575 kwintal.

Perusahaan Gula

Pada tahun 1861, Mangkunegoro IV mengusulkan kepada Belanda untuk mendirikan pabrik gula. Rencana itu disetujui, dan merupakan orang Jawa pertama yang diizinkan mendirikan pabrik gula. Pembangunan pabrik pertama dilakukan pada Desember 1891 yang diberinama Colomadu. Pembangunan pabrik berasal dari uang Mangkunegaran sendiri, dibantu dari Gubernur dan seorang mayor Tionghoa dari Semarang sebesar f.400.000. Berkat pengelolaan yang baik, pada tahun 1863, dengan tanah 93 ha menghasilkan gula 3.700 kwintal. Pada tahun 1874, Mengkunegaran mendirikan lagi pabrik gula yang diberinama Tasikmadu. Dampak kepemilikan dua pabrik gula itu, Mangkunegara memegang peranan penting dalam mengendalikan produksi gula di Jawa

Sumber: Siswokartono (2005:70-72)

Berdasarkan uraian ini jelas bahwa secara politik posisi Kasunanan lebih diakui oleh Pemerintah Belanda sebagai pewaris Kerajaan Mataram paling senior. Namun dari sudut yang lain yakni dalam pengembangan bisnis, Mangkunegara jauh lebih maju. Dengan berkembangnya bisnisnya Mangkunegaran mempunyai kontribusi besar bagi perkembangan ekonomi kota Surakarta dan sekitarnya. Perkebunan Mangkunegara membentang di wilayah seperti Karanganyar, Sukowati (Sragen) dan

juga Wonogiri. Sementara dua pabrik Gulanya Tasik Madu dan Colo Madu berada di wilayah Karanganyar. Bisnis Keraton Mangkunegaran ini yang memberikan warna tersendiri dalam evolusi ekonomi Kota Surakarta dan sekitarnya hingga sebelum era kemerdekaan.

3.2. Dinamika Ekonomi

3.2.1. Transformasi Transportasi Dari Sungai ke Kereta Api

Secara regional Pulau Jawa dibagi menjadi dua kawasan pesisir yakni pesisir utara yang menghadap laut Jawa dan pesisir selatan yang menghadap Samudera Hindia. Pesisir selatan yang menghadap Samudera Hindia tidak dapat didayagunakan secara produktif karena berhadapan dengan samudera yang luas dan ganas.. Ketidakberdayaan menghadapi ganasnya Samudera Hindia itu akhirnya diwujudkan oleh keyakinan orang Jawa terhadap adanya penguasa laut dari selatan yang disebut sebagai Nyai Roro Kidul. Mitologi itu sangat efektif dimanfaatkan oleh Raja-raja Mataram Islam dengan simbol perkawinan antara Raja dengan Nyai Roro Kidul dalam rangka memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Raja (Ricklefs, 2005: 99).

Dari sudut politik perpindahan kekuasaan Demak yang di pesisir utara Pulau Jawa ke Mataram yang berada di pesisir selatan adalah melindungi dari serangan musuh dari utara. Maka jika dilihat dari sudut politik kekuasaan, perpindahan kerajaan Islam ke selatan ini, tidak lain hanyalah dalam rangka memperkuat pertahanan negara semata. Akan tetapi dari sudut ekonomi, perpindahan itu menghambat perkembangan bisnis, karena di pesisir selatan Pulau Jawa ini tidak memungkinkan adanya aktivitas ekonomi yang produktif. Kapal-kapal niaga tidak dapat merapat di pantai-pantai pesisir selatan, para nelayan juga sangat terbatas sekali dapat memanfaatkan sumber daya kelautannya. Maka, kekuasaan Mataram Islam sebelah selatan ini semakin menyempitkan arti sebagai bangsa bahari yang mempunyai jangkauan luas ke mancanegara seperti masa Sriwijaya, Majapahit dan Demak.

Kerajaan Demak masih mempunyai kekuatan maritim yang kuat. Armada Demak yang dikirim oleh Patih Unus dari Jepara ke Malaka pada bulan Januari 1513 merupakan armada besar yang terdiri seratus kapal, empat puluh jung dan enam puluh lancara. Kapal-kapal itu merupakan "kapal tempur" yang sangat kuat dibandingkan kapal dari daerah lain di Nusantara, karena memang dibuat dari kayu jati yang besar dan kokoh (Lombard, 2005: 94). Sebaliknya pada Mataram kekuatan bahari semakin merosot. Data yang disampaikan Lombart (2005: 96) menegaskan kesimpulan itu. Pada tahun 1820 pelayaran di pantai utara Pulau Jawa, didominasi oleh Belanda (25,6%), Inggris (22,6%), Arab (21,6%) dan Tionghoa (16,7%), sedangkan orang Jawa, Sunda, dan Madura hanya sebesar 7,3%. Namun pada tahun 1850, pelayaran di pantai utara Pulau Jawa didominasi oleh armada-armada Arab (50,7%) dan Tionghoa (28,7%), sedangkan orang Jawa, Sunda dan Madura semakin merosot hingga 3,1%. Ini menunjukkan bahwa semakin sedikit orang Jawa yang melakukan pelayaran di pesisir Pulau Jawa (tabel 3.1).

Tabel 3.1. PersentaseTonase Pelayaran Pantai Utara Pulau Jawa Berdasarkan Etnis

	1820	1830	1840	1850
Total Tonase (dalam last) 1 last= 2 ton	10.844	17.361	17.779	15.503
Indeks	100	160	164	143
Belanda	25,6%	20,9%	21,2%	9,6%
Inggris	22,6%	20,6%	15,7%	9,3%
Bangsa Eropa Lainnya	5,2%	0,5%	0,9%	-
Arab	21,8%	32,5%	31,4%	50,7%
Tionghoa	16,7%	11,6%	25,7%	28,7%
Jawa, Sunda, Madura	7,3%	10,0%	4,6%	3,1%

Sumber: Lombart, 2005: 96

Pada masa Kerajaan Mataram Islam ini semua perdagangan laut di Jawa lenyap. Pulau Jawa meskipun pulau diantara kepulauan nusantara yang lain, namun telah kehilangan kebudayaan maritimnya. Malahan Jawa menjadi lebih terasing jika dibandingkan dengan wilayah lain di Asia. Apalagi Jawa tidak mempunyai hubungan daratan dengan daerah lain, karena terkungkung oleh lautan. Karena hilangnya

hubungan laut, maka Jawa kehilangan semua komunikasi dengan negara-negara Asia yang lain. Pada masa itu, Jawa mengalami isolasi yang sangat ekstrim. Pengasingan diri ini merupakan penyebab menguatnya feodalisme aristokratis dengan segala sifat-sifatnya yang negatif. Ini memunculkan tradisi kebangsawanan, sedangkan tradisi ekonomi dan niaga hampir hilang semuanya, berikut ini pendapat Burger (1984: 102) mengenai hal ini:

“Di Jawa, Mataram mengasingkan diri yakni ketika sang Raja melarang rakyat bawahannya melakukan pelayaran. Pada tahun 1700 semua perdagangan laut Jawa lenyap, maka Jawa, walaupun pulau, tidak lagi mempunyai kebudayaan kepulauan dalam arti suatu kebudayaan yang terbuka bagi pengaruh-pengaruh dari laut. Malah Jawa lebih terasing jika dibandingkan suatu bagian benua - karena setelah kehilangan perhubungan laut- benua masih mempunyai hubungan dengan dunia luar melalui daratan. Tetapi Jawa sebagai pulau tidak mempunyai hubungan daratan dengan dunia luar. Justru karena Jawa adalah suatu pulau, maka dengan hilangnya pelayaran, ia menjadi lebih “kontinental” dalam arti lebih terasing dan tertutup dari bagian benua yang lain.”

Untuk membuka akses perdagangan ke dunia luar, Kerajaan Mataram hanya mengandalkan transportasi sungai. Namun, kenyataannya sebagian besar sungai-sungai yang mengalir di daerah Jawa Tengah adalah sungai yang mengalir dari arah utara ke selatan dan hanya sedikit sungai yang mengalir dari selatan ke Laut Jawa. Sungai-sungai itu biasanya mengalir dari Laut Jawa ke Samudera Hindia seperti Kali Comal di daerah Pemalang Kali Pemali daerah Tegal. Di wilayah selatan sebagian besar sungai juga mengalir dari arah utara ke ke selatan seperti Kali Serayu di Banyumas dan Kali Bogowonto di Magelang. Selain itu juga terdapat Kali Progo dan Kali Opak yang berada di Yogyakarta yang bermuara di Samudera Hindia. Hanya sedikit sungai yang mengalir dari selatan ke utara yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam mendukung transaksi perdagangan. Seperti telah disebutkan di atas, di Jawa Tengah bagian selatan hanyat terdapat dua sungai besar yang mempunyai karakteristik sama yaitu mengalir dari selatan ke utara yakni Sungai Tuntang dan Bengawan Sala.

Sungai Tuntang berhulu di Rawa Pening Salatiga di Kaki Gunung Merbabu dan Telomoyo yang melalui Kedung Jati, Gubug, Demak Bintoro bermuara di Laut Jawa.

Dalam sebuah cerita tentang Sultan Hadiwijaya salah seorang Raja Demak yang ketika muda dikenal dengan Joko Tingkir karena berasal dari Desa Tingkir Salatiga melakukan perjalanan menuju Demak menunggang kawanan buaya melalui sebuah sungai yang besar. Sungai yang mengalir dari arah Salatiga ke Demak adalah Sungai Tuntang. Sementara itu, sungai yang lebih besar dan jangkauannya lebih luas yang mengalir dari selatan ke utara adalah Bengawan Sala. Hulu Bengawan Sala terletak di Pegunungan Seribu (Wonogiri) yang mengalir ke Laut Jawa melalui Bojonegoro hingga Surabaya. Maka, seperti telah disebutkan di atas ketika Pakubuwono II akan membangun Keraton baru terdapat dua alternatif pilihan tempat yakni di Desa Tingkir (Salatiga) yang berdekatan dengan Sungai Tuntang atau di Desa Sala yang berdekatan dengan Bengawan Sala. Dengan pertimbangan bahwa Bengawan Sala menjangkau wilayah yang lebih luas ke Jawa Timur dari pada Sungai Tuntang yang hanya sampai ke Demak, maka Pakubuwono II lebih memilih Desa Sala sebagai Keraton yang baru. Dengan kata lain, pilihan Desa Sala yang berdekatan dengan Bengawan Sala merupakan pertimbangan ekonomis dalam mendukung perkembangan ekonomi kerajaan.

Bengawan Sala sudah menjadi pelabuhan sungai sejak jaman Pajang. Bengawan Sala pada mulanya bernama Bengawan Beton, namun karena untuk menghormati sesepuh desa itu yang bernama Ki Gede Sala, maka menjadi terkenal dengan sebutan Bengawan Sala. Ki Gede Sala padamulanya adalah abdi dalem Kerajaan Pajang yang bernama Ki Bahu Reksa. Selain sebagai bandar pelabuhan, Ki Baru Reka juga bertugas untuk menyediakan tukang-tukang yang berkerja di Karaton. Raja memanggil Ki Bahu Reksa dengan Ki Soroh, dan karena kebanyakan orang menyebut nama itu dengan salah, maka menjadi Ki Sala. Di sebelah tenggara Desa Sala terdapat Desa Nusupan yang dijadikan sebagai pelabuhan para nakhoda yang berlayar ke Gresik dan Surabaya atau sebaliknya. Hubungan bisnis inilah yang menyebabkan munculnya daerah-daerah perdagangan dan berkembangnya berbagai etnis seperti Arab, Tionghoa, Madura dan juga kantor-kantor perdagangan VOC yang bermukim di sekitar Bengawan Sala ini (Sudharmono, 2006: 10). Maka, dengan ditetapkan Desa Sala sebagai Ibu Kota baru Kerajaan Mataram Islam, Bengawan Sala

menjadi semakin ramai dan menjadi urat nadi perekonomian pada masa itu. Meskipun sebenarnya pemanfaatan Bengawan Solo sebagai urat nadi perekonomian hingga menjangkau perdagangan ke daerah lain di luar Jawa tidak berkembang seperti yang diharapkan. Terutama karena memang adanya ketentuan dari Pemerintah Kolonial yang melarang orang-orang Jawa berdagang ke luar Jawa sejak perjanjian Pakubuwono II dan VOC pada tahun 1745.

Dalam perkembangannya transportasi sungai itu tidak berlangsung lama, terutama setelah Pemerintah Belanda membangun jalur kereta api. Pada tahun 1870 jalur kereta api pertama dari Semarang sampai ke *Vorstenlanden* yang dikelola oleh perusahaan swasta *Nederlandsch Indische Spoorweg* (NIS) untuk mengangkut gula yang dihasilkan perkebunan tebu swasta di Surakarta dan Yogyakarta. Beberapa tahun setelah munculnya jalur kereta api itu, pengangkutan barang melalui Bengawan Sala terhenti. Ini menyebabkan pusat perdagangan berpindah dari Sangkrah dan Beton ke bagian tengah Kota Surakarta. Dalam perkembangannya kereta api tidak hanya membawa komoditi-komoditi, melainkan juga mengangkut penumpang. Pada tahun 1875, kereta api telah mengangkut 899.000 penumpang dan 124.000 ton barang dagangan dan memperoleh penghasilan sebanyak 2 juta gulden. Pada 1875, kereta api mampu mengangkut 950.000 penumpang dan 334.000 ton barang dagangan yang menghasilkan 2,6 juta gulden. Pada tahun 1894, jalur timur yang dikelola perusahaan negara *State Railway* (SS) mencapai Surakarta yang menghubungkan *Vorstenlanden* dengan Surabaya (Shiraishi, 1997:10-11) (lihat Boks 2)

Berdasarkan data tersebut jelas bahwa angkutan kereta api memasuki abad ke-20 telah menggantikan transportasi sungai. Ini pertanda bahwa masyarakat Jawa telah masuk pada abad modernisasi angkutan, dimana angkutan pra moderen yang diwakili oleh transportasi sungai digantikan oleh transportasi darat menggunakan kereta api. Fungsi Bengawan Sala yang pada mulanya menjadi sangat sentral sebagai urat nadi perekonomian wilayah Surakarta, berubah drastis hanya sebagai alat pengairan sawah. Bahkan karena maraknya penebangan pohon di hutan-hutan di Pegunungan Seribu (Wonogiri), Bengawan Sala menjadi penyebab utama banjir besar yang

melanda Surakarta dan sekitarnya pada tahun 1960-an yang nanti akan diuraikan pada bab berikutnya.

BOKS 2:

PERKEMBANGAN KERETA API DARI TIMUR-BARAT DAN SEMARANG KE VORSTENLANDEN

Jalur kereta api yang melalui timur-barat dan Semarang ke *Vorstenlanden* yang dilayani oleh NIS dan SS mengalami peningkatan pesat baik dari jumlah kilometer dan jumlah penumpang (lihat tabel 3.1). Pada tahun 1895 angkutan kereta api melalui timur-barat dan Semarang-*Vorstenlanden* telah berhasil membuat jalur sepanjang 1.319 kilometer, kemudian mengalami peningkatan masing-masing menjadi 1.609 km (1900); 1.704 km (1905); 2.174 km (1910); 2.448 km (1915). Dengan peningkatan jumlah penumpang yang sangat tinggi, jika pada tahun 1895 mencapai sebesar 5,759 juta penumpang mengalami kenaikan masing-masing menjadi 9,738 juta (1900); 13,361 juta (1905); 28,420 juta (1910); 42,479 juta (1915). Penghasilan dari angkutan penumpang mencapai 3,054 juta gulden pada tahun 1895 meningkat menjadi 4,022 juta (1900); 4,979 juta (1905); 8,625 juta (1910); dan 13,685 juta (1915). Sementara penghasilan dari angkutan barang mencapai 6,588 juta gulden pada tahun 1895, dan mengalami peningkatan masing-masing menjadi 9,743 juta (1900); 10,216 juta (1905); 15,738 juta (1910); 22,194 juta (1915).

Tabel 3.2. Transportasi Kereta Api Melalui Jalur Timur Barat dan Semarang-Vorstenlanden

Tahun	Kilometer	Penumpang	Penghasilan Dari (dalam juta gulden)	
			Penumpang	Barang
1895	1.319	5.759.000	3,054	6,588
1900	1.609	9.738.000	4,022	9,743
1905	1.704	13.361.000	4,979	10,216
1910	2.174	28.420.000	8,825	15,738
1915	2.448	42.579.000	13,685	22,194

Sumber: Shiraishi, 1997:11.

3.2.2. Transformasi dari Pertanian, Perkebunan Ke Industri Gula

Evolusi ekonomi kota Solo dimulai pada akhir abad ke 16, ketika ekonomi kerajaan Pajang berkembang dengan daya dukung produksi pertanian dari daerah kerajaan Pajang sebelah selatan (B.Schrieke, Vol 1, 1960). Pajang merupakan kerajaan pedalaman yang merupakan penghalusan budaya (*refined culture*) Jawa dan bersaing dengan kerajaan Demak sebagai kerajaan pantai. Kondisi bekas kerajaan Pajang saat ini, menjadi sebuah kelurahan di pemerintahan kota Surakarta (Pemkot Surakarta) yaitu berupa Kalurahan Pajang. Sebagian nama-nama kampung di Kalurahan Pajang masih menunjukkan bekas kerajaan. Pasar tradisional tempat jual beli produksi pertanian masa kerajaan Pajang, diperkirakan terletak di jalan pertigaan Jongke saat ini (daerah Laweyan sebelah barat). Hasil produksi pertanian utama masa Pajang adalah beras.

Pada saat kerajaan Pajang dihancurkan oleh Panembahan Senopati, seorang pendiri Kesultanan Yogyakarta dengan menjadikan alas Mentaok (hutan Mentaok) sebagai wilayah kerajaan Mataram, maka produksi pertanian daerah Pajang menjadi wilayah kerajaan Mataram yang berpusat di Kota Gede. Setelah itu, pusat kerajaan berpindah ke Kartosuro sebagai pusat kraton yang baru. Kerajaan Kartosuro tetap berbasis pertanian sampai kerajaan itu pindah ke Surakarta pada abad ke 18. Sejak Kerajaan Surakarta berdiri, selama abad ke 18, ekonomi pertanian tetap menjadi kekuatan ekonomi kerajaan Surakarta yang pada abad ke 19 lebih tertata sistem manajemennya. Pola sistem yang tertata ini ditunjukkan dengan adanya sistem lungguh (*apanage*) yaitu suatu sistem gaji berupa tanah bagi pegawai kerajaan dan kerabat raja. Luas lungguh ini tergantung pangkat, posisi/kedudukan seorang bagsawan/priyayi.

Kebebasan menyewakan atau menjual tanah *apanage* ini, dimulai ketika sistem uang masuk ke dalam sistem ekonomi pertanian yang bersifat pengabdian feodal. Akibatnya orang Eropa dan Timur Asing, terutama orang Tionghoa ikut membuka usaha di sektor perkebunan. Kerajaan Surakarta dan Kerajaan Yogyakarta yang masing-masing terdiri dari Kasunanan Surakarta, Kadipaten Mangkunegaran, Kasultanan Yogyakarta dan Puro Pakualaman. Wilayah itu oleh orang Eropa disebut

Vorstenlanden (daerah kerajaan). Pada saat sistem tanam paksa sebagai kebijakan ekonomi kolonial di Jawa abad ke 19, daerah *Vorstenlanden* tidak dimasukkan pada wilayah sistem tanam paksa ini (Robert Van Niel, 2003). Hal ini karena sistem *apanage* dianggap akan mempersulit kolonial untuk mengurusnya dalam manajemen pemerintahannya.

Ekonomi daerah *Vorstenlanden* (Solo dan Yogyakarta) mengalami kesulitan setelah perjanjian Palihan Negari tahun 1755, dimana wilayah Kasunanan Surakarta termasuk kota Solo dan Kasultanan Yogyakarta berdiri secara terpisah. Dari segi kewilayahan administrasi, banyak pegawai diangkat oleh pemerintahan kerajaan dengan gaji sistem *apanage*. Kelemahan sistem ini adalah akan mempersulit dari sudut ekonomi pedesaan, yaitu ketika tanah-tanah *apanage* ini ada yang terletak di wilayah Kasultanan Yogyakarta dan sebaliknya. Hal ini merupakan taktik Belanda untuk memecah belah kekuatan politik Kasultanan di Yogyakarta dan Kasunanan di Surakarta (Solo), sekaligus menghancurkan sistem ekonomi pedesaan disekitar pusat kraton Solo dan Yogyakarta.

Kehidupan ekonomi pedesaan sekitar pusat Kraton Solo dapat dilihat dari pola penghasilan dan pengeluaran petani sikep (kuli sikep), kuli kendho, kuli indung dan kuli tlosor. Para petani ini membentuk ikatan sosial yang mewujudkan solidaritas sosial agar ekonomi pedesaan dapat dipertahankan. Hasil tanah yang digarap petani menghasilkan produksi yang rendah, karena mereka mengakui adanya konsep bahwa tanah itu milik raja (*Vorstendomein*). Sistem ini mengharuskan petani menyerahkan beberapa unsur sesuai dengan pengabdian feodal, seperti tenaga kerja wajib, tenaga kerja sewaktu raja mempunyai hajat, upeti hasil bumi, pajak (masa kolonial) dan lain-lain.

Keadaan ekonomi pedesaan daerah *Vorstenlanden* Surakarta seperti daerah Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen dan Boyolali menjadi relatif sulit setelah perlawanan Pangeran Diponegoro terhadap penjajah yang memakan waktu dari tahun 1825 sampai tahun 1830. Masyarakat yang tinggal di kota Solo dan daerah-daerah pedesaan sekitarnya mengalami kesulitan mencari penghasilan (uang). Sebuah "surat kabar perdagangan" yang terbit di Surabaya menyebutkan bahwa

daerah Surakarta merupakan daerah miskin. Orang kebanyakan atau rakyat tidak lagi mempunyai uang untuk membeli bahan makan dan pakaian. Kajian di atas didukung dengan disertasi Suhartono tentang “apanage dan bekel” untuk melihat perubahan sosial dan gambaran ekonomi pedesaan di pedesaan Surakarta 1839-1920. Disertasi tersebut menjelaskan bahwa panen yang gagal dan kenaikan harga barang-barang menyulitkan para petani daerah Surakarta untuk hidup.

Kondisi masyarakat Jawa semakin terpuruk ketika Belanda menerapkan sistem tanam paksa (*cultuurstelsel*). Tanam paksa diinisiasi oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch pada tahun 1830. Ia mempergunakan desa-desa di Jawa untuk memproduksi komoditi-komoditi yang mudah diekspor ke luar negeri. Rakyat dipaksa menanam tanaman ekspor yang dikehendaki oleh pemerintah. Beberapa komoditi yang diwajibkan untuk ditanam adalah kopi, tebu, teh, tembakau, kayu manis, kapas dan nila (indigo). Hampir semua wilayah di Jawa terkena kebijakan tanam paksa, kecuali daerah Kerajaan Surakarta dan Yogyakarta (*Vorstenlanden*). Misalnya untuk tanaman kopi banyak terkonsentrasi di Priangan dan Cirebon. Sementara untuk tebu sebagai bahan baku gula terdapat di Banten, Cirebon, Pekalongan, Tegal, Semarang, Jepara, Rembang, Banyumas, Medun, Kediri, Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, Kediri dan Banyuwangi. Dampak dari tanam paksa sangatlah buruk bagi petani di Jawa. Para petani mengalami kemiskinan bahkan di Jawa Tengah pada tahun 1849-1850 terjadi bencana kelaparan, karena berkurangnya bahan pangan sebagai akibat kegagalan panen dan merosotnya daya beli masyarakat. Maka mulai tahun 1870, tanam paksa mulai dikurangi dan baru tahun 1915 tanam paksa dihentikan sama sekali (Burger, 1984: 198-224) (lihat Boks 3).

BOKS 3:

TANAM PAKSA (CULTUURSTELSEL)

Dalam rangka mensukseskan sistem tanam paksa Van den Bosch mengadakan cara-cara efisien untuk mendorong para pegawai mensukseskan perkebunan-perkebunan pemerintah dan merangsang mereka untuk memperbesar jasa yaitu dengan cara yang disebut dengan sistem persentase. Memang benar, tindakan-tindakan tersebut adalah cara yang paling efisien untuk mencapai tujuan yang diharapkan, akan tetapi ini menjadi sumber perbuatan semena-mena. Sistem ini dianggap sebagai legalisasi pemerintah kolonial terhadap segala macam pemerasan. Beberapa bentuk pemerasan itu adalah mewajibkan tanaman tertentu kepada petani dengan jalan mencoba-coba; adanya kerja tambahan disamping menyelenggarakan tanaman wajib; pajak-pajak dan kerja wajib tetap dibebankan kepada masyarakat. Ini jelas bahwa penerapan tanam paksa adalah didominasi oleh motif ekonomi.

Hasil tanam paksa adalah menaikkan penghasilan Negeri Belanda. Antara tahun 1831-1877, Belanda menerima kekayaan sebesar 823 juta gulden. Ini mengembalikan kembali masa kejayaan Belanda pada masa keemasan VOC sebagai negara yang disegani dalam bidang perdagangan. Kritik terhadap sistem tanam paksa mulai muncul pada tahun 1848 baik di parlemen ataupun oleh sekelompok penulis, pegawai, menteri, sebagian besar kolonialis kawakan. Salah seorang pegawai, Douwes Dekker, menuliskan kekejaman era ini dalam bukunya yang sangat terkenal Max Havelaar. Kritik-kritik semacam ini yang mendorong adanya perubahan, hingga pada akhirnya sistem tanam paksa dibatalkan secara gradual sejak 1870.

Sumber: Kartodirdjo (1999: 16).

Di Kerajaan Surakarta dan Yogyakarta tidak diberlakukan tanam paksa, justru yang berkembang di daerah ini adalah sewa lahan oleh pihak swasta Persewaan tanah ini berhubungan erat dengan kebijakan yang digariskan oleh Keraton. Karena sebagai kerajaan agraris, Mataram mempunyai sistem pemerintahan yang relatif teratur berdasarkan pada mekanisme tanah kerajaan. Dalam konsep ini, pada dasarnya seluruh tanah kerajaan adalah milik raja. Karena status dan perannya, maka famili dan birokrat kerajaan mendapatkan *lungguh* atau sebidang tanah untuk dikelola yang dimaksudkan sebagai balas jasa telah mengabdikan kepada Kerajaan. Abdi Kerajaan yang mendapatkan *lungguh* itu disebut sebagai *patuh*. *Lungguh* ini dapat diasosiasikan sebagai upah seorang abdi kepada Kerajaan (Suhartono, 1991: 16-18).

Dalam perkembangannya mulai tahun 1816, *lungguh* itu disewakan kepada orang Belanda dan Tionghoa untuk mengembangkan perkebunan. Kendati pun pada masa ini perkebunan swasta dapat berkembang, seperti ditunjukkan dengan adanya sejumlah orang Tionghoa dan Eropa menyewa tanah dari penguasa dan para pemegang *lungguh*, akan tetapi sampai dengan tahun 1850 yang disewa masih relatif kecil. Tanah-tanah itu hanya ditanami padi, sayuran dan buah-buahan hanya untuk konsumsi lokal saja (Shiraishi, 1997: 12).

Seiring dengan semakin mengalirnya modal swasta Belanda ke Surakarta dan Yogyakarta, Pemerintah melarang orang Tionghoa menyewa tanah, namun membiarkan modal swasta Belanda membanjiri daerah ini. Maka, pada periode setelah tahun 1850, pemilik perkebunan swasta Belanda mengalami peningkatan pesat. Jika pada tahun 1855, di Surakarta, perkebunan Eropa baru sekitar 30.000 bau, maka pada tahun 1860 telah meningkat hingga 160.000 bau, dan pada tahun 1864 mencapai 200.000 bau. Sementara, di Yogyakarta, kendatipun agak lambat, tetapi perkebunan Eropa mengalami perkembangan yang pesat. Misalnya di Surakarta pada 1870 ada 137 perkebunan, dimana 73 menanam kopi atau kombinasi dengan beberapa tanaman lain, 31 diantaranya menanam tebu, 30 indigo dan 19 tembakau. Pada tahun yang sama, hanya ada 58 perkebunan di Yogyakarta, diantaranya 46 menanam indigo, 8 tebu dan 6 tembakau. Sampai dengan tahun 1880, tanah yang disewa orang Eropa untuk perkebunan meningkat pesat hingga 301.000 bau di Surakarta dan 88.000 bau di Yogyakarta (Shiraishi, 1997: 12).

Resesi ekonomi terjadi pada pertengahan tahun 1880-an menjadi anti klimaks bagi perkebunan pengusaha Eropa di Surakarta. Ini menyebabkan penyewaan tanah di Surakarta sejak tahun 1880 mengalami penurunan. Jika pada tahun 1880 sebanyak 301.000 bau, maka mulai tahun 1890 merosot menjadi 259.000 bau. Pada tahun 1905 mengalami peningkatan sedikit yakni mencapai 273.000 bau, namun setelah itu mengalami komrosotan terus menerus yakni 246.000 (1895). 246.000 (1900) dan menjadi 214.000 (1915) serta 183.000 (1920) (lihat tabel 3.3).

Tabel 3.3. Tanah Yang disewahkan kepada Perkebunan Eropa di Surakarta dan Yogyakarta 1875-1920 (dalam bau)

Tahun	Surakarta	Yogyakarta
1862	-	46.000
1864	200.000	-
1875	248.000	78.000
1880	301.000	88.000
1890	259.000	93.000
1895	273.000	93.000
1900	246.000	89.000
1905	245.000	85.000
1910	235.000	95.000
1915	214.000	97.000
1920	183.000	102.000

Ket: 1 bau = 0,71 Ha

Sumber: Sumber: Shiraishi, 1997:14

Pada masa sebelum resesi, sebagian besar pengusaha itu mendapatkan modal dari bank perkebunan (*Culture Bank*) yakni *Dorrepaal Co*. Pada tahun 1884, bank tersebut membiayai 21 perkebunan tebu, 38 perkebunan kopi dan 53 perkebunan komoditi lainnya. Mereka mengerjakan perkebunannya secara sendiri-sendiri atau individual, dengan teknologi yang masih sangat sederhana. Sebagian dari tanaman tebu untuk menjadi gula masih diolah dengan cara yang sangat sederhana. Karena mutunya kurang bagus, akhirnya mereka lebih mengutamakan menanam indigo (nila) dari pada tebu. Ini menyebabkan produktivitas perkebunan mereka semakin merosot. Mereka juga sangat mudah dipengaruhi oleh kenaikan tingkat suku bunga dan naik turunnya harga komoditi. Maka, resesi ekonomi menyebabkan banyak perusahaan yang dikelola secara mandiri itu jatuh yang berdampak pada pailitnya Bank *Dorrepaal Co* pada tahun 1884. Pemerintah mengubah bank tersebut menjadi *Dorrepaalsche Bank* dan direkonstruksi kembali menjadi *Cultuur Maatschappij der Vorstenlanden* (Perusahaan Perkebunan *Vorstenlanden*) yang mengawasi sejumlah perkebunan di wilayah Surakarta dan Yogyakarta. Bank-bank tersebut mulai melakukan pembenahan manajerial kepada perusahaan perkebunan Eropa itu serta melakukan

pengawasan yang ketat. Sementara pengelolaan perkebunan diserahkan kepada manajer-manajer perkebunan yang berpengalaman (Shiraishi, 1997: 14).

Resesi ekonomi juta menyebabkan beberapa komoditi mengalami kemerosotan terutama kopi dan indigo, sementara justru tembakau dan gula mengalami peningkatan. Ini menyebabkan perkebunan berkonsentrasi untuk mengembangkan komoditi tembakau dan gula.⁵ Apalagi setelah Konvensi Brussels tahun 1902 yang membuka pasaran dunia bagi gula tebu. Oleh sebab itu, banyak lahan yang disewakan mulai dikembalikan atau diubah penggunaannya dari perkebunan indigo menjadi tembakau dan gula tebu. Ini menunjukkan bahwa resesi ekonomi telah mendorong adanya transformasi dari perkebunan barang-barang pertanian menjadi perkebunan yang mendukung sektor industri terutama industri rokok dan gula tebu.

Di Surakarta produksi gula meningkat dari 332.000 pikul pada tahun 1890 dari sebelumnya hanya 198.000 pikul pada tahun 1880. Pada tahun 1900, produksi gula mengalami peningkatan menjadi 725.0000 pikul dan menjadi 1215.000 pikul pada tahun 1910. Jika dibandingkan dengan Yogyakarta, produksi gula di Surakarta masih kalah jauh (lihat tabel 3.3), karena pada tahun yang sama produksi gula di Yogyakarta masing-masing adalah 277.000 pikul (1880); 475.000 pikul (1890); 865.000 pikul (1900); dan 1.687.000 pikul (1910). Sementara untuk produksi tembakau, Surakarta jauh melebihi Yogyakarta. Pada tahun 1880 produksi tembakau di Surakarta telah mencapai 805 ton, sementara di Yogyakarta hanya sekitar 49 ton. Di Surakarta produksi tembakau mengalami peningkatan yang pesat yakni masing-masing 1.053 ton (1890); 5.717 ton (1900); dan 6.421 ton (1910). Sementara di Yogyakarta, pada tahun 1890 hanya sekitar 17 ton, namun setelah itu mengalami peningkatan yang pesat menjadi 1.520 ton (1900) dan 1.855 ton (1910) (lihat tabel 3.4).

⁵ Industri gula menjadi industri primadona di Pulau Jawa mulai tahun 1830. Pada mulanya sudah ada pabrik-pabrik gula yang menggunakan tenaga hewan ternak yang menggunakan batu gerinda dan bangunan pabriknya masih terbuat dari kayu. Secara umum dengan teknologi sederhana ini, hasil produksinya masih jelek dan kualitasnya tidak seragam. Mulai paruh 1830, Pemerintah Belanda memberikan subsidi pabrik-pabrik gula untuk menggunakan tenaga air. Baru pada tahun 1855, 18 pabrik gula di daerah Surabaya sekitar 60% menggunakan tenaga uap (Dick, 2000: 181-182).

Tabel 3.4. Produksi Gula dan Tembakau di Vorstenlanden 1880-1910

Tahun	Gula (dalam ribuan pikul)		Tembakau (dalam ton)	
	Surakarta	Yogyakarta	Surakarta	Yogyakarta
1880	198	277	805	49
1890	332	475	1053	17
1900	725	865	5717	1520
1910	1215	1687	6421	1855

Ket: 1 pikul = 61,76 kilogram

Sumber: Sumber: Shiraishi, 1997:14

Sementara itu, produksi tembakau dan gula di wilayah Eks Karesidenan Surakarta paling besar di daerah Klaten. Pada tahun 1890, produksi tembakau di daerah Klaten baru sekitar 950 ton, namun pada tahun 1900 telah meningkat menjadi hampir lima kalinya yakni mencapai 4.454 ton, kemudian pada tahun 1910 menjadi 5255 ton. Peringkat kedua sebagai produsen terbesar tembakau adalah Surakarta yakni jika pada tahun 1890 hanya sekitar 11 ton, maka pada tahun 1900 dan 1910 masing-masing menjadi 614 ton dan 839 ton. Di Sragen, pada tahun 1890 produksi sebesar 54 ton, terus mengalami peningkatan pada tahun 1900 dan 1910 masing-masing mencapai 306 ton dan 121 ton. Di Boyolali, produksi tembakau pada tahun 1890 hanya sekitar 35 ton meningkat pada tahun 1900 dan 1910 masing-masing menjadi 295 ton dan 200 ton. Yang paling kecil produksi tembakau terdapat di Wonogiri, yakni pada tahun 1890 hanya sekitar 3 ton, meningkat menjadi 49 ton pada tahun 1900, dan menurun lagi menjadi 6 ton pada tahun 1910 (tabel 3.5).

Tabel 3.5. Produksi Gula dan Tembakau di Surakarta, Boyolali, Klaten, Sragen, Wonogiri dan Mangkunegaran 1890-1910.

	Surakarta	Boyolali	Klaten	Sragen	Wonogiri	Mangkunegaran
Gula (dalam ribuan pikul)						
1890	-	103	203	26	-	48
1900	66	41	520	98	-	102
1910	91	112	829	183	-	195
Tembakau (dalam ton)						
1890	11	35	950	54	3	
1900	614	295	4454	306	49	
1910	839	200	5255	121	6	

Sumber: Sumber: Shiraishi, 1997:14

Seperti halnya dalam produksi tembakau, produksi gula terbesar juga berada di daerah Klaten. Untuk produksi gula di Klaten pada tahun 1890 mencapai 203.000 pikul meningkat menjadi 520.000 pikul (1900) dan 829.000 pikul (1910). Urutan kedua ditempati oleh Mangkunegara yang mempunyai dua pabrik gula Colomadu dan Tasikmadu yakni pada tahun 1890 baru memproduksi 48.000 pikul menjadi 102.000 pikul pada tahun 1900 dan 195.000 pikul pada tahun 1910. Urutan berikutnya di daerah Sragen yang masing-masing adalah 26.000 pikul (1890); 98.000 pikul (1900); dan 183.000 pikul (1910). Di daerah Boyolali produksi gula tebu juga cukup bagus yakni masing-masing 103.000 pikul (1890); 41.000 pikul (1900); dan 112.000 pikul (1910). Produksi gula paling rendah adalah di daerah Surakarta yakni hanya 66.000 pikul (1900) dan 91.000 pikul (1910) (lihat tabel 3.5). Hingga tahun 1915 masih terdapat sekitar 98 perkebunan di Eks Karesidenan Surakarta yang terbagi pada daerah Surakarta (10); Klaten (35); Boyolali (18); dan Sragen (35) (lihat tabel 3.6).

Tabel 3.6. Perkebunan Swasta Eropa di daerah Surakarta tahun 1915

No	Kabupaten	Jumlah Perkebunan	Jenis Tanaman
1	Surakarta	10	tembakau, indigo, gula, kopi dan agave
2	Klaten	35	tembakau, indigo, gula, agave
3	Boyolali	18	tembakau, kopi, indigo, lada, karet, kapas
4	Sragen	35	kopi, indigo, karet, teh, gula, agave, kapas
5	Jumlah	98	

Sumber: Liyst van Particuliere Ondermeringen in Nederlandsch-Indie. Batavia, Landsdrukkerij 1915 hal:206-210

Dari uraian di atas, jelas bahwa pada era ini telah terjadi proses transformasi dari tanaman rakyat seperti beras, dan kebutuhan pokok lain menjadi tanaman perkebunan seperti indigo, kopi, tembakau dan tebu. Seiring dengan semakin besarnya peningkatan permintaan gula dan didukung dengan adanya pabrik yang moderen, maka terjadi proses transformasi dari sektor perkebunan ke sektor industri. Perubahan itu membawa konsekuensi terhadap penyerapan tenaga kerja pada masyarakat sekitar pabrik. Ini merupakan persentuhan pertama, bagi masyarakat Jawa terhadap mekanisme industri moderen. Di sini masyarakat mengenal pengertian

”buruh” atau pekerja pabrik, yang sebelumnya tidak pernah dikenalnya pada masa agraris.

3.2.3. Munculnya Industri Kecil

Sejak abad-12, pada masa Kerajaan Majapahit, masyarakat Jawa telah mengenal batik. Seni batik berasal dari India, masuk ke tanah air bersamaan dengan masuknya kebudayaan Hindu yang berhasil menurunkan silsilah Kerajaan Hindu di Nusantara. Itulah sebabnya mengapa batik pada mulanya hanya dikenal di dalam lingkungan keraton saja. Bahkan situasi ini, tidak mengalami perubahan sampai pertengahan abad 19 pada masa awal Kerajaan Surakarta dan Yogyakarta. Ini disebabkan karena pembuatan batik masih dipandang sebagai pekerjaan individual para ahli yang membutuhkan waktu pembuatan yang relatif lama. Atau dengan kata lain, pada masa ini batik masih dianggap sebagai barang mewah (LPEM, 1958:235).

Perkembangan industri batik di kota Solo juga dimulai dari kegiatan para istri bangsawan dan priyayi yang membatik dengan corak batik tulis tangan sebagai cara pengembangan seni batik. Hasil batik tulis ini kemudian berkembang menjadi komoditi batik yang mampu bersaing dengan batik-batik dari India, Bali, Lasem pada abad ke 19. Pada awalnya, batik tulis ini dibuat hanya untuk konsumsi keluarga priyayi saja, terutama dalam acara adat, seperti perkawinan. Batik dalam acara tersebut, memiliki corak dan jenis yang disesuaikan dengan pangkat, gelar dan lainnya dan pada masa kolonial Belanda diatur dengan *besluiten* (surat-surat keputusan). Kain batik menjadi salah satu bagian dari pakaian resmi dan perlengkapan upacara kebesaran priyayi (Sartono Kartodirdjo, 1993). Bahkan di Keraton Surakarta, seni membatik sangat dihargai sehingga kemampuan membatik dianggap bagian penting dari pendidikan perempuan di Keraton (Shiraishi, 1997: 30).

Batik baru menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat pada pertengahan 1840, ketika pedagang batik Kauman mengenal metode baru membatik yang menggunakan cap. Cap yang terbuat dari tembaga itu mampu membuat batik dalam jumlah yang banyak dengan tenaga kerja yang sedikit. Mulai dari sinilah produksi batik yang bersifat massal terjadi di Surakarta. Dengan semakin meningkatnya penghasilan dari

sektor perkebunan permintaan terhadap bati semakin meningkat. Meminjam istilah Shiraishi (1997:32), pada era ini Surakarta merupakan pusat utama industri batik dan mendominasi pasar lokal dan nasional sampai akhir tahun 1910-an.

Sementara itu, kondisi di kota Surakarta memperlihatkan bahwa batik tulis yang semula menjadi monopoli keluarga bangsawan dan priyayi, mulai bergeser dikerjakan orang Tionghoa sejak tahun 1890-an, dan pengrajin pribumi. Pada waktu pasaran batik sudah menjangkau pasar-pasar di seluruh Jawa, orang Tionghoa menguasai perdagangan bahan-bahan batik seperti berbagai jenis soga, dan kain katun (Suhartono, 1991). Kendati pun demikian, jumlah pengusaha batik pribumi di Jawa Tengah pada umumnya dan Surakarta pada khususnya tetap mendominasi. Jumlah pengusaha batik pribumi jauh lebih banyak dari pada pengusaha entis lain. Berdasarkan data tahun 1931, jumlah pengusaha batik di Jawa yang paling banyak adalah di Jawa Tengah yakni mencapai 2,347 perusahaan, sedangkan di Jawa Barat terdapat 1,757 perusahaan, dan di Jawa Timur hanya 280 perusahaan. Dari sudut etnis, jumlah pengusaha batik pribumi di Jawa Tengah mencapai 1,804 perusahaan, sedangkan di Jawa Barat dan Jawa Timur masing-masing adalah 1,472 dan 239 perusahaan. Sementara itu, pengusaha batik Tionghoa yang terbanyak adalah di Jawa Tengah mencapai 418 perusahaan, sedangkan di Jawa Barat dan Jawa Timur masing-masing adalah 282 dan 24 perusahaan. Pengusaha batik Arab hanya ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur masing-masing adalah 113 dan 17 perusahaan. Demikian halnya pengusaha batik Eropa hanya terdapat di Jawa Tengah yakni hanya sekitar 12 perusahaan.

Tabel 3.7. Pemilik Perusahaan Batik Berdasarkan Etnis di Jawa tahun 1931

Daerah	Pribumi	Tionghoa	Arab	Eropa	Total
Jawa Barat	1,472	282	-	-	1,757
Jawa Tengah	1,804	418	113	12	2,347
Jawa Timur	239	24	17	-	280
Total	3,515	727	130	12	4,384

Sumber: Sutter (1959: 47)

Berdasarkan data tahun 1930, orang pribumi tetap mendominasi jumlah kepemilikan perusahaan batik di Surakarta mencapai 236 perusahaan. Sementara sisanya dimiliki oleh orang Arab (88); Tionghoa (60); dan Eropa (3) (lihat tabel 3.7). Selain itu, di Kota Surakarta mulai berkembang berbagai kerajinan seperti kerajinan kuningan untuk bokor, kerajinan emas dan kuningan untuk pendhok keris dan kerajinan perak. Hasil kerajinan itu dijual dipasar-pasar dan kerajaan menarik pajak penjualan. Hal itu ditunjukkan dengan pemasaran batik Surakarta telah menembus pasar-pasar di Yogyakarta dan Priangan (Jawa Barat). Kondisi ini menunjukkan bahwa kerajinan batik di kota Solo sudah terkenal di pasar-pasar di luar kota Surakarta.

Tabel 3.8. Pemilik Perusahaan Batik di Surakarta 1930.

No	Pemilik Perusahaan	Jumlah
1.	Jawa (pribumi)	236
2.	Tionghoa	60
3.	Arab	88
4.	Eropa	3

Sumber: Sariyatun, 2005:140

3.2.4 Perkembangan Perbankan dan Depresi Ekonomi

Perkembangan bisnis kolonial tidak dapat dilepaskan dari peranan sektor perbankan. Inggris adalah negara yang mempunyai jumlah jajahan terbesar di dunia yang didukung oleh kekuatan sektor perbankan yang kuat. Pusat perbankan Inggris yaitu Lombart Street menjadi tumpuan pemerintah jika akan melakukan ekspansi kolonialisasi. Kennedy (1989:105) mengungkapkan bahwa keberhasilan Inggris sebagai negara penjajah jika dibandingkan dengan negara-negara lain seperti seperti Perancis, karena dukungan sistem perbankan yang kuat. Bahkan dalam batas-batas tertentu perbankan secara tidak langsung berperan dalam proses pengambilan keputusan, khususnya berhubungan dengan pembiayaan peperangan dan kolonisasi, sehingga bank-bank ini mempunyai kedudukan yang kuat, karena dapat memutuskan, apakah perang perlu dilakukan atau tidak.

Kendati pun tidak semaju Inggris, sektor perbankan di Belanda juga mendukung keuangan. Pada mulanya VOC juga berperan seperti lembaga keuangan yang membiayai proyek perkebunan dan perdagangan. Namun karena VOC juga mengurus masalah-masalah non ekonomi, seperti menaklukan banyak kerajaan, yang justru menyebabkan VOC mengalami banyak kerugian dan akhirnya bangkrut. Maka setelah VOC dibubarkan, bank-bank Belanda mengambil alih pembiayaan investasi di Hindia. Beberapa bank Belanda yang beroperasi di Indonesia adalah Nederlandsche Handel-Mij atau NHM (1824); De Javasche Bank (1828); Nederlandsche-Indische-Escompto-Mij atau NIEM (1863); Nederlandsche-Indische Handelsbank atau NIHB (1863); dan Handels Vereeniging Amsterdam atau HVA (1863). Diantara bank-bank itu yang terpenting adalah De Javasche Bank. Karena selain sebagai bank komersial juga mempunyai hak oktrooi atau hak mengedarkan uang. Selain itu, pada awal abad 20 juga ada beberapa bank asing yang berasal dari Inggris, Hong Kong dan Shanghai Banking Corporation, Bank of Taiwan, The Yokohama Specie Bank dan Mitsui Bank (Rahardjo, dkk, 1995: 40).

Posisi bank-bank Belanda itu memang hanya membiayai perusahaan perkebunan Belanda, sehingga sangat rentan terhadap siklus bisnis. Karena kredit untuk perkebunan yang mereka berikan hampir seluruhnya adalah jangka panjang, dan mana kalai terdapat goncangan bisnis eksternal, bank-bank tersebut akan terkena dampaknya. Seperti telah disinggung di muka pada tahun 1884 terjadi resesi ekonomi yang dipicu oleh kelebihan produksi gula dan menyebabkan harga gula jatuh. Beberapa bank-bank di Indonesia menghadapi bahaya kebangkrutan. Secara keseluruhan sistem perbankan menghadapi kerugian besar lebih dari 40 juta gulden. Tindakan penyelamatan dilakukan oleh bank-bank Belanda. Sebuah bank Belanda NIHB dilikuidasi dan asetnya dipindahkan ke NILM. Pemerintah juga memperkuat permodalan Bank Kolonial yang mengalami krisis likuiditas. Dorrepaalsche Bank yang membiayai perkebunan gula di Surakarta dan Yogyakarta juga mengalami kebangkrutan. Bank itu direkonstruksi kembali menjadi Cultuur Maatschappij der Vorstenlanden (Perusahaan Perkebunan Vorstenlanden) (Van Laanen, 1986:348).

Sejak peristiwa kebangkrutan beberapa bank dalam menghadapi resesi ekonomi 1884 itu, pemerintah melakukan restrukturisasi sistem perbankan. Dari sini timbulah perbedaan yang nyata antara usaha perbankan umum dalam arti pengadaan kredit jangka pendek dan jangka sedang, dengan apa yang disebut usaha perbankan perkebunan atau yang melayani pinjaman jangka panjang. Sebagian besar bank mulai membebaskan diri dari kepentingan-kepentingan perkebunan. Sedapat mungkin, semua pinjaman jangka panjang dan jaminan hipotek diperpendek waktunya atau diminta melunasinya. Bank-bank itu menukar haluan dan menjadi pemberi modal pokok atau kerja kepada perusahaan-perusahaan dagang. Karena bank-bank ini menyediakan modalnya secara permanen untuk keperluan dan kepentingan perkebunan, maka mereka tidak dapat lagi disebut bank pemberi kredit, melainkan sebagai perusahaan-perusahaan pemegang saham perkebunan. HVA dan NILM merupakan contoh yang jelas dari perbankan bentuk ini. Sebaliknya NHM dan Internatio hampir tidak memiliki perusahaan, artinya di tetap fokus pada usaha pembiayaan jangka pendek. Sementara yang bertahan pada bidang perkebunan adalah Koloniale Bank dan Cultuur Maatschappij der Vorstenlanden atau Perusahaan Perkebunan Vorstenlanden di Surakarta dan Yogyakarta (Van Laanen, 1986: 349).

Tabel. 3.9. Produksi Relatif Perusahaan Milik Bank-Bank Pertanian Dari Jumlah Produksi ^{a)} atau Jumlah Ekspor ^{b)} dari Indonesia 1933.

Bank	Gula	Kopi	Teh	Karet
NHM	25	9	7	7,5
NILM	6	0,4	0,6	0,3
Internatio	4	5	2	1
HVA	12	NA	NA	NA
Koloniale Bank	6	13	4	0,4
Cultuur Maschappij de Vorstenalnden	6	-	-	-
Jumlah	61	27,4	13,6	92

Ket: a) produksi gula; b) jumlah ekspor Kopi, Teh dan Karet

Sumber: Van Laanen (1986:350).

Pada masa ini sudah ada bank yang telah berkembang di Jawa yaitu Bank

Vereeniging Oet Tiong Ham yang dipunyai oleh konglomerat Tionghoa Oet Tiong Ham yang juga disebut sebagai "Raja Gula". Bank ini berkedudukan di Semarang bermodal *f* 15.000.000. Bank ini mirip dengan NHM yang membiayai kegiatan usahanya sendiri yang beraneka ragam (Sutter, 1959: 88). Oei Tiong Ham -generasi ketiga dari perusahaan Kian Gwan di Semarang- telah menyaingi hegemoni orang-orang Eropa, dengan menguasai 5 buah pabrik gula. Bahkan dia menguasai hampir 60% ekspor dan perdagangan gula dalam negeri. Keberhasilan Oei Tiong Ham, disusul dengan pembukaan pabrik penyulingan alkohol di Shanghai dan pabrik *remilling* karet di Palembang yang berhasil mengekspor 2000 sampai 3000 ton karet *blanket* dan *sheets* ke Amerika tiap tahun (Panglaykim dan Palmer, 1970).

Sementara itu, bank yang dimiliki oleh pribumi baru berdiri di Surabaya pada tahun 1928 bernama Bank Nasional Indonesia. Bermula dari kesadaran tokoh-tokoh Budi Utomo untuk memberntuk organisasi yang lebih liberal yang disebut dengan The Indonesische Studieclub yang menginisiasi kegiatan seperti sekolah pertunanan, koperasi daging, pusat kerajinan, perkumpulan dagang, majalah dan lembaga pendidikan. Selain itu, tokoh pergerakan BU diantaranya adalah dr. Soetomo, dr. Samsi dan Ir. Anwari juga mendirikan bank yang bernama NV Bank Nasional Indonesia. Sekalipun hanya bermodal kecil sebesar *f* 500.000, tetapi Bank Nasional Indonesia telah mempunyai cabang di 5 kota yaitu, Mojokerto, Malang, Yogyakarta, Magelang dan Bandung (Sutter, 1959: 89, 122).

Dua tahun kemudian, tahun 1930 di Bukittinggi, Sumatera Barat didirikan pula Bank Nasional dan Bank Abuan Saudagar pada tahun 1932. Sebenarnya pada tahun 1912 sudah berdiri badan perkreditan rakyat oleh Patih Purwokerto R. Aria Wiraatmadja dengan membentuk Centrale Kas dengan modal *f* 5000.000. Baru pada tahun 1934, Centrale Kas diubah menjadi Algemeene Volkscredietbank (AVB) yang berkedudukan di Jakarta dengan modal *f* 21.400.000. Direktur AVB diangkat oleh Gubernur Jenderal, sedangkan operasionalnya diawasi oleh Presiden De Javasche Bank sebagai Komisaris Pemerintah (Rahardjo, dkk, 1995: 41).

3.2.5. Persaingan Bisnis pada Zaman Pergerakan

Seperti telah disinggung di muka, bahwa perkembangan industri batik di Surakarta telah melahirkan pengusaha besar di kalangan pribumi dan Tionghoa. Diantara mereka saling bersaing untuk merebut pasar. Pada masa ini pengusaha pribumi agak tersudut, mana kala katun dan bahan dasar batik lainnya yang diimpor oleh firma-firma Eropa dipasarkan melalui pengusaha-pengusaha Tionghoa. Di sini praktis pengusaha Tionghoa menguasai bahan baku utama industri batik. Ini menyebabkan pengusaha pribumi tidak mempunyai akses langsung terhadap bahan-bahan dasar batik itu. Selain itu, pengusaha Tionghoa juga mempunyai solidaritas yang tinggi dalam kelompoknya. Salah satu paguyuban Tionghoa yang besar adalah Kong Sing. Kong Sing adalah perkumpulan tolong menolong para pengusaha Tionghoa di Surakarta. Pada mulanya Kong Sing hanya bergerak dalam bidang pemakaman dan pesta, namun kemudian berkembang dalam bidang perlindungan anggota dan perdagangan. Sementara, pengusaha pribumi tidak mempunyai organisasi untuk melindungi kepentingan kelompoknya. Situasi ini dapat dipahami mengingat sebagian pengusaha pribumi adalah hanyalah pengusaha batik, berpendidikan rendah, dan tidak ada yang berpengalaman organisasi (Shiraishi, 1997:51).

Kesempatan untuk bergabung organisasi bagi pengusaha pribumi terbuka ketika berdiri Budi Utomo (BU) cabang Surakarta. Budi Utomo sesuai dengan kecendungan yang terjadi pada aras nasional, banyak diminati oleh golongan priyayi Jawa. Banyak para pembesar keraton yang bergabung dengan organisasi ini. Menurut pandangan Shiraishi (1997:51) ada perbedaan persepsi antara empat keraton di Surakarta dan Yogyakarta. Kasunanan dan Mangkunegaran di Surakarta serta Pakualaman di Yogyakarta menanggapi secara positif tumbuhnya organisasi pergerakan, sedangkan Kasultanan Yogyakarta tetap kolot. Perkembangan BU di Yogyakarta banyak disokong oleh kalangan Keraton Pakualaman, sedangkan di Surakarta didukung oleh para pembesar Keraton Kasunanan dan Mangkunegaran. Situasi seperti ini menyebabkan BU di Surakarta pada mulanya bersifat elitis, karena bergerak hanya di

lingkungan Keraton. Dalam rangka memperluas keanggotaan di luar kalangan priyayi, BU mencoba mendekati kalangan pengusaha pribumi. Tawaran dari BU ini mendapat sambutan antusias dari para pengusaha pribumi, maka beberapa pedagang batik terkemuka di Lawean yang dipimpin Haji Samanhoedi dan Haji Bakri dari Kauman bergabung ke dalam BU. Masuknya pengusaha pribumi ke BU telah meningkatkan jumlah anggota BU menjadi 800 orang (Shiraishi, 1997:51).

Bergabungnya pengusaha pribumi ke BU cukup menggusarkan para pengusaha Tionghoa. Mereka memperkirakan bahwa BU akan dapat menjadi kendaraan politik pengusaha-pengusaha pribumi. Oleh sebab itu, pengusaha Tionghoa mencoba mengajak Haji Samanhudi untuk berpindah perkumpulan mereka Kong Sing. Tujuannya jelas dengan bergabung di Kong Sing, pengusaha pribumi dapat dikontrol oleh pengusaha Tionghoa. Rupanya bagi pengusaha pribumi, tawaran untuk bergabung dengan Kong Sing juga sebuah peluang, mengingat sebenarnya tujuan utama bergabung dengan organisasi adalah mendapatkan akses bisnis. Akhirnya, Haji Samanhudi dan pengikutnya keluar dari BU bersedia bergabung dengan Kong Sing, bahkan ia menjadi salah satu komisaris dalam perkumpulan itu. Namun di dalam perkembangannya Haji Samanhudi dan pengikutnya merasa terasing di Kong Sing. Mereka mulai merasa diperlakukan tidak adil dan mulai ada ketidakcocokan. Situasi ini mendorong Haji Samanhudi dan pengikutnya keluar dan mendirikan organisasi sendiri yang bernama Rekso Rumecko pada awal tahun 1912 (Shiraishi, 1997:51).

Rekso Rumecko sesuai dengan namanya adalah “penjaga” atau organisasi ronda yang bertugas melindungi dan menjaga keamanan. Sebagai organisasi yang serupa dengan Kong Sing, tidak terelakkan sering terjadi konflik fisik antara pengikut Rekso Rumecko dan Kong Sing. Ini mengundang kecurigaan pihak Pemerintah Belanda yang kemudian memeriksa dasar hukum pembentukan Rekso Rumecko itu. Pada masa itu, setiap perkumpulan tanpa status hukum dapat dibubarkan setiap saat dengan perintah residen. Karena sebagian besar aktivis Rekso Rumecko kebanyakan para pedagang pribumi dan abdi dalem di Keraton yang buta huku, maka Samanhudi

meminta tolong kepada Martodharsono seorang wartawan yang pernah menjadi redaktur Medan Priyayi untuk mencari solusi. Martodharsono meminta bantuan kepada Tirtoadisurjo yang telah mendirikan Sarekat Dagang Islam (SDI) di Bogor dan menganggap bahwa Rekso Rumekso adalah cabang dari SDI itu. Dengan alasan seperti ini, pihak berwenang ternyata bisa menerima dan sejak itu pula Rekso Rumekso berubah menjadi Sarekat Dagang Islam (SDI) atau lebih populer dengan nama Sarekat Islam (SI) (Shiraishi, 1997:56-57). SI tercatat sebagai organisasi sosial pertama yang mempunyai anggota sekitar 400 ribu orang dan mempunyai cabang hampir di seluruh kota besar di Jawa dan Sumatera (Kahin, 1952:67).

Munculnya Sarekat Islam (SI) telah mendorong lahirnya berbagai aktivis politik yang mewakili berbagai aliran di Surakarta. Di dalam kelompok Islam terdapat Haji Samanhudi pendiri SI yang kemudian digantikan oleh HOS Tjokroaminoto dan memindahkan kantor pusat SI dari Surakarta ke Surabaya. Tokoh-tokoh golongan kiri juga bertaburan di Surakarta seperti Haji Misbah, Mas Marco yang nanti sangat berperan dalam pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) tahun 1926. Pemberontakan ini dapat segera ditumpas oleh Pemerintah Belanda, dan tokoh-tokohnya dibuang ke Boven Digul (Shiraishi, 1997:467). Beberapa ahli sejarah menempatkan pemberontakan tahun 1926 itu -yang tidak saja terjadi di Jawa Tengah melainkan juga di Banten dan Sumatera Barat- merupakan tonggak penutup babak pertama sejarah pergerakan nasional pada periode 1908-1927 (Surjomihardjo, 1988: 14). Polarisasi politik antara kelompok itu menjadi salah satu pemicu munculnya radikalisme masyarakat terhadap feodalisme yang nanti tercermin dalam "gerakan anti swapraja" di Surakarta. Selain itu, Pemberontakan PKI pada tahun 1926 itu juga menjadi titik balik dari para aktivis politik yang sangat diawasi oleh Pemerintah Belanda seperti "Rumah Kaca".

Setelah pemberontakan PKI 1926 yang gagal, banyak para aktivis yang dipenjara dan sebagian lain tiarap. Dalam situasi seperti ini, para pengusaha batik justru mulai bangkit membentuk organisasi semacam koperasi untuk memperkuat posisinya dalam menghadapi persaingan dengan pengusaha Tionghoa. Seperti telah

diungkapkan di muka, bahwa pengusaha Tionghoa mempunyai akses yang luas terhadap bahan baku batik, sedangkan pengusaha pribumi tidak. Oleh sebab itu, para pengusaha batik pribumi mulai mengorganisasikan diri dengan membentuk Batik Bond pada tahun 1934. Kemudian, pada tahun 1936, para pengusaha batik mencoba untuk kembali Laweyan mendirikan koperasi pengusaha batik dengan nama "Persatuan Perusahaan Batik Bumi Putera (PPBBP). Pada tahun 1937, PPBBP berubah namanya menjadi "Persatuan Perusahaan Batik Bumiputera Surakarta" (PPBBS) yang didirikan oleh Raden Wongsodinomo dan Haji Moechammad Sofwan⁶ (Sutter, 1959:46).

3.2.6. Masa Pendudukan Jepang

Masa pendudukan militer Jepang di Indonesia umumnya, khususnya di Surakarta tahun 1942-1945 dari segi evolusi ekonomi harus dibicarakan masalah-masalah pertama masalah perubahan administrasi pemerintahan masalah ini erat dengan kebijakan militer Jepang di bidang ekonomi. Kedua, masalah tekanan ekonomi dan mobilitas penduduk Surakarta. Pada masa feodalisme kerajaan, ada unsur pengabdian feodal dalam menjalankan tugas ekonomi. Misalnya saja ketika para bangsawan menanamkan modalnya untuk usaha perdagangan pantai abad-abad ke-13-17, pedagang-pedagang bekerja secara serius sekali, karena ada unsur pengabdian feodal. Unsur pengabdian feodal inidmanfaatkan Belanda ketika menjajah Indonesia. Inilah sebabnya Belanda sangat menghargai para pejabat tradsional sebagai "island besteuur" (pemerintahan pribumi) yang membantu pemerintahan kolonial.

Masa pendudukan militer Jepang di Surakarta untuk melancarkan arus pemerintahan umumnya dan khususnya arus ekonomi pendudukan, pemerintah militer Jepang merubah sistem pemerintah feodal. Wilayah daerah Surakarta dinamakan Solo Koti yaitu Daerah Istimewa Surakarta yang terdiri dari Solo Koti (daerah Istimewa Kasunanan) dan daerah Istimewa Mangkunegaran (Mangkunegaran Koti). Baik Solo Koti dan Mangkunegaran Koti mempunyai hak isitmewa seperti masa kerajaan dahulu, termasuk hak istimewa di bidang ekonomi.

⁶ Penerus Raden Wongsodinomo saat ini mempunyai perusahaan batik Danarhadi.

Pada dasarnya perubahan administrasi pemerintahan daerah Surakarta itu hanya bersifat formalitas saja secara substansial daerah Surakarta masih merupakan daerah kerajaan yang oleh pemerintahan militer Jepang dinamakan “kochi” atau “koti” menurut tulisan Indonesia dan artinya daerah istimewa. Pelantikan kepala daerah istimewa Surakarta ini dinamakan Solo Koo, yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 31 Juli 1942 dan Mangkunegara Koo pada tanggal 14 Agustus 1942 (Kan Po, 1942).

Dengan Pelantikan Balatentara dari Nipon dengan Susuhunan Surakarta dan Mangkunegara diatur dengan undang-undang buatan pemerintah pendudukan militer Jepang (Kan Po, 1942). Dengan undang-undang itu Kasunanan Koehi mempunyai 4 ken (Kabupaten), 18 Gun (Kawedanan) dan 66 Jon (onderdistrik, sekarang kecamatan/sedangkan Mangkunegaran seperti sebelum pendudukan mempunyai 4 ken, 9 Gun dan 41 kapanewon (onderdistrik) (Rijksblad Mangkunegaran 1929). Nama-nama kabupaten diganti ken, kewedanan diganti gun dan sistem wedono masa Belanda diganti Sonco, yang di daerah Mangkunegaran Sonco merupakan kapanewanan yang sama dengan wilayah asisten wedono di kasunanan. Di desa, kapala desa/Lurah desa dinamakan Kuco. Di bawah Kuco yang memerintah daerah Ken (kelurahan) pemerintah militer Jepang membentuk Tonarigeumi (wilayah Rukun Tetangga), di bawah pimpinan Gumico (Ketua RT).

Struktur pemerintahan inilah yang menggerakkan ekonomi pendudukan militer Jepang dan memobilisasikan penduduk untuk Perang Asia Timur Raya. Perubahan administrasi pemerintahan dimaksudkan pemerintah militer Jepang untuk memperlancar proses kebijakan militer Jepang dalam gerakan penduduk dalam arus sosial ekonomi seperti diketahui pemerintah militer Jepang di Surakarta, seperti daerah-daerah lain di Pulau Jawa, kekuarangan tenaga administrasi sehingga Jepang di Jawa/Indonesia masih tetap menggunakan orang Indonesia dalam administrasi pemerintahannya. Di Surakarta, Pemerintah Militer Jepang menginstruksikan beberapa hal yaitu pertama, pengumpulan emas dan Berlian. Kedua, penanaman tanaman Jarak secara masal di lahan pertanian dan tepi jalan untuk kepentingan

minyak persenjataan. Ketiga, penanaman tanaman kapas untuk pemintalan benang tekstil.

Untuk kepentingan produktivitas yang baik pemerintah militer Jepang membentuk sidoin jarak dan sidoin kapas untuk koordinasi proses penanamannya. Situasi ekonomi di Surakarta pada tahun 1942 tampak sangat berat bagi beban penduduk. Sebuah majalah "Panji Poestaka" yang terbit pada nopember 1942 memuat berita bahwa bulan-bulan maret, april, mei 1942 di beberapa daerah penduduk melakukan barter/pertukaran barang kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi pada bulan-bulan itu ada ekonomi barter di daerah Surakarta karena kesulitan ekonomi uang. Pada tahun 1942, masa pendudukan militer Jepang di Surakarta, rakyat kesulitan hidup. Pemerintah militer Jepang mengumumkan patokan harga beras dengan uang federal. Pada bulan Juli 1942 pemerintah militer Jepang di Surakarta mengumumkan harga beras sebagai berikut, pertama harga beras kualitas baik, per 100kg seharga f 7,70; kualitas rendah seharga f 6,50 per 100 kg. Bulan-bulan pertama pendudukan militer Jepang harga beras rata-rata naik 25 persen. Kedua, harga-harga minyak goreng, ikan asin, terigu, kenaikannya tidak sebesar beras, jadi masih jauh di bawah rata-rata harga beras yang mencapai 25 persen.

Maklumat Guen Sei Bei surakarta 8 juni 1942 tidak menetapkan harga-harga ikan asin, gandum, minyak goreng, teh dan kebutuhan pokok lainnya tidak ada kenaikan harga. Ini berarti harga barang-barang kebutuhan pokok sejak Maret 1942 hingga 8 Juni 1942 tetap stabil. Semua toko di Surakarta akan mendapat sanksi berat bila menaikkan harga barang-barang kebutuhan pokok (sembako). Dari bulan-bulan Juni 1942 hingga Nopember 1942 harga beras per 100 kg cenderung turun, dari f 7.70 per 100kg bulan Juni 1942 menjadi rata-rata f 7.40 selama Juli-desember 1942. Ada operasi harga-harga di toko-toko oleh pemerintah militer Jepang, sehingga stabil harga barang-barang kebutuhan pokok.

Pada akhir tahun 1942 nampak di beberapa kota di Jawa terutama di Surakarta, Surabaya masyarakat mulai menjual pakaian bekas. Di Surakarta merupakan awal dari penjualan pakaian bekas yang disampirkan di pundak penjual sehingga terlihat

“nglewer” (menggantung ke bawah) dan melahirkan pasar klewer. Jadi pasar klewer yang saat ini menjadi bursa sandang modern, masa pendudukan militer Jepang tahun 1942 merupakan tempat penjualan pakaian bekas mulai tahun 1943 keadaan ekonomi di Surakarta nampak berat bagi penduduk. Pemerintah militer Jepang memobilisasikan penduduk untuk menggerakkan ekonomi demi kepentingan militer Jepang. Penanaman kapas untuk pemintalan sebagian bahan baku tekstil digiatkan. Penduduk (petani) dipaksa menyerahkan padi untuk kepentingan militer. Bangsawan-bangsawan surakarta dipaksa menyerahkan emas dan berlian kepada Jepang. Pada akhir pengumpulan emas dan berlian, daerah Surakarta menjadi daerah terbanyak perolehannya dalam pengumpulan emas dan berlian.

Pemerintah militer Jepang di surakarta mengatur penjualan beras dan distribusinya. Jepang membentuk koperasi agar penduduk dapat diatur distribusinya dalam pembelian beras. Praktis penduduk kota yang kaya dapat dikelola kekayaan pangannya oleh Jepang di Surakarta yang merupakan peraturan dari pusat Jakarta. Keadaan ekonomi di surakarta masa pendudukan militer Jepang dari bulan ke bulan makin berat. Pengumpulan emas, berlian dan intan semakin diintensifkan. Pada tahun 1944 untuk mendapatkan jatah pakaian, pemerintah militer Jepang menggunakan sistem kupon. Akibatnya ialah tidak meratanya pembagian pakaian itu. Ada warga Surakarta yang mendapat kupon dan ada yang tidak. Suatu laporan tertulis dari Kabupaten Mangkunegara (Mangkunegaran Ken) pada 15 Oktober 1943 murid sekolah sejumlah 9707 di kota Surakarta hanya 1572 anak yang mendapat kupon pembagian kain cita pakaian. Ada sejumlah kupon seperti kupon minyak, kupon pakaian, kupon rokok dan lainnya. Tanpa kupon ini langkalah warga kota untuk memperoleh barang dengan harga murah. Di Wonogiri penduduk sudah mengalami kesulitan untuk mendapatkan pakaian dan bahan makanan. Penduduk sudah ada yang memakan bagian dari akar pisang yang disebut “ares”. Bahan akar pisang sekaligus digunakan sebagai lauk dan sayur.